

Lampiran 1 : Penelitian Terdahulu yang relevan

Judul Penelitian	Peneliti, Tahun	Temuan	Relevansi dan penekanan dalam penelitian disertasi	Fokus penekanan dalam penelitian ini
Aspek Geostrategi Energi				
Indonesia sebagai poros maritim dunia, suatu tinjauan geopolitik	Yani, Y.M & Montrama, I, 2018	Teori <i>balance of power</i> hanya memberi dua opsi, yaitu balancing atau bandawagoning	Gambaran Posisi geostrategi laut Andaman, lansekap tarikan tarikan power di kawasan	HK
Modifiers for military strategy	Andi Widjajanto, 2013	Pertimbangan geostrategi dan kepentingan nasional merupakan salah satu determinan dalam budaya militer	Posisi geostrategi laut Andaman – Aceh menjadi bagian pertimbangan dalam strategi pertahanan negara	HK
Balance of threat theory and the the genesis of the Gulf Cooperation Council : An interpretative case study	Priess, 1996	Teori balance of threat, dalam hal ada ancaman internal yg disponsori dari luar	Dalam era multipolar power, Indonesia perlu mengantisipasi dan mengambil formulasi strategi yang tepat	HK
The belt and road initiative, a lens into Tiongkok's Energy Security and Maritime Strategy	Barua, 2021	Pergerakan RRT dengan OBOR direspon US dengan aliansinya dalam forum QUAD	Selat Malaka – Laut Andaman merupakan gerbang Indo Pacific – India – Teluk - Afrika	HK

Sino-Indian security dilemma in the Indian Ocean : revisiting the “string of pearls” strategy	Tariq, 2016	Strategi <i>string of pearl</i> oleh RRT, dipandang sebagai ancaman oleh India, yang dapat memicu security dilemma	Indonesia perlu antisipatif, dan tidak terjebak dalam <i>security dilemma</i> . Mengoptimalkan sumber daya di daerah frontier dan perbatasan adalah upaya penguatan integritas wilayah	HK
Rivalry between Iran and Saudi Arabia in the geostrategic contest of energy	Torres, 2017	Kekuatan regional dapat dibangun dengan memanfaatkan keunggulan di sektor energi	Kedudukan geostrategi Selat Malaka – laut Andaman yang memiliki sumber daya alam energi, merupakan modal yang perlu dioptimalkan	E
Energy and the military : Convergence of security, economic, and environmental decision making	Constantine Samaras, WJ Nuttall, M Bazilian, 2019	Energi dan pertahanan memiliki interaksi, dalam kebijakan, strategi dan taktik. Transfer teknologi, selain untuk menstimulasi ekonomi, juga untuk penghematan energi	Dorongan ke energi bersih, di tengah ketersediaan energi fosil di Indonesia perlu dicermati implikasinya untuk ekonomi, kesejahteraan penduduk dan pertahanan	E
Renewable energy and geopolitics : A review	Vakulchuk et al, 2020	Pergeseran fokus ke energi terbarukan tidak serta merta mengurangi perebutan pengaruh geopolitik	Aktivitas migas di laut Andaman , offshore Aceh diperlukan untuk memperkuat integritas wilayah	I
Energy economy, finance and geostrategy	Dorsman, 2018	Energi adalah politik. Pergeseran pertimbangan geostrategi, dari titik berat penilaian ancaman (threat assessment) menjadi analisa resiko (<i>risk analysis</i>)	Perlu antisipasi resiko. Resiko seperti terorisme, perdagangan senjata ilegal, narkoba serta pelintas batas sering terjadi di pusat pusat sumber energi hidrokarbon	P

Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia	Ardiyanti, 2018	Presiden Joko Widodo mencanangkan kebijakan geopolitik Poros Maritim Dunia	Kebijakan, strategi dan upaya perlu konsistensi dan sinergitas pada berbagai bidang	SB
Andaman and Nicobar Islands – India's untapped strategic assets	Kaul, 2015	India berusaha mendapatkan status archipelago untuk gugus kepulauan Nicobar dan Andaman, tetapi tidak disetujui PBB di bawah UNCLOS	Gugus kepulauan Nicobar dan Andaman yang berbatasan ke Pulau Weh – Sabang, dipandang strategis oleh India	HK
India and Indonesia : Strengthening maritime relations,	Gupta, 2018	Kedudukan Sabang dan Pulau Weh sangat strategis bagi India di kawasan, dari aspek kemaritiman dan keamanan	Indonesia perlu mengaitkan kedudukan strategis Sabang sebagai jalur logistik dan konektivitas, dengan pengelolaan sumber daya alam	E
Sumber Daya Migas di daerah perbatasan				
Saddam's war of words : Politics, religion, and the Iraqi invasion of Kwait	Long, 2004	Ketidakjelasan batas wilayah di daerah frontier mengandung migas dapat memicu perang	Indonesia perlu mengelola sumber daya migasnya di perbatasan	E
Oil and gas deposits across national frontiers	Lagoni, 1979	Kemenerusan cadangan melewati batas negara, memerlukan rujukan hukum yang tepat	Customary international law dapat memihak kepada Negara yang de facto lebih kuat di lokasi	E
Joint development in the South Tiongkok Sea : exploring the	Meierding, 2017	Perjanjian pengelolaan hidrokarbon bersama, seperti di LCS patut dipertimbangkan	Pendekatan Joint Development Area tetap dimungkinkan di berbagai daerah perbatasan	E

prospects of oil and gas cooperation between rivals				
Joint development : An alternative legal approach to oil and gas exploitation in the Nigeria – Cameroon Maritime Boundary dispute	Okafor, 2006	Adanya delimitasi maritim, tetap memerlukan kerja sama rasional dengan negara tetangga	Indonesia perlu membuka kesempatan pusat pusat pertumbuhan regional dengan negara tetangga	E
Joint development of common offshore oil and gas deposits: mere state practice or customary international law ?	Ong, 1999	UNCLOS lebih banyak mengulas hal yang berkaitan dengan biota dan sumber daya laut	Untuk pengelolaan sumber daya alam migas, perlu pengelolaan efektif	E
Australia-Indonesia Sea bed boundary negotiations : Proposals for a joint development zone in the Timor gap	Willheim, 1989	Indonesia pernah mengadopsi esi Seapendekatan joint development zone di Timor gap	Pendekatan ini relatif berhasil, untuk daerah yang disputable	E
The Timor gap : The legality of the Treaty on the Zone of Cooperation in an Area between the Indonesian province of East Timor and Northern Australia	Clark, 1992	Pendekatan joint devepment zone di Timor gap digugat oleh pihak yang menganggap posisi Indonesia di Timtim tidak legitimate	Perlu kehati-hatian dalam pendekatan joint development zone, untuk tidak menjadi pintu masuk klaim sovereignty	E

The new Timor sea treaty and interim arrangements for joint development of petroleum resources of the Timor Gap	Bialek, Triggs 2002	Perjanjian Timor gap diteruskan oleh Timor Leste - Australia	Menunjukkan legitimasi profesional dalam menyelesaikan klaim teritorial	E
No EEZ solution : the politics of oil and gas in the eastern Mediteranian	Stocker, 2012	Penggunaan metode ZEE terkadang tidak efektif kalau ada tumpang tindih klaim. Pendekatan equidistance, equity dan proportionality	Selain pendekatan perjanjian, pendekatan politik bilateral maupun multilateral juga dapat menjadi pilihan	E
The International Court of Justice and the territorial dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea	Butcher, 2013	Sengketa perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Ambalat, juga merupakan perebutan sumber daya alam	Kekalahan Indonesia di mahkamah ICJ perlu menjadi pelajaran dan hikmah	E
Offshore oil and gas projects amid maritime border disputes : applicable law.	Blyschack, 2013	Perselisihan batas maritim dapat menggunakan tiga rujukan hukum, yaitu UNCLOS, pilihan hukum joint development agreements, serta international case law	Indonesia harus mengantisipasi hal ini, sehingga sumber daya di perbatasan harus dikelola dengan baik	E
Pengamanan sumber energi Natuna D-Alpha dalam kerangka menjaga keamanan wilayah perbatasan	Armien Soegito, 2008	Penempatan dan penyesuaian deployment kekuatan pertahanan untuk menjaga keamanan wilayah	Laut Andaman – Aceh adalah wilayah perbatasan yang mengandung sumber daya migas	HK

Dampak Infrastruktur Maritim Dasar Laut di Wilayah Laut Natuna Indonesia Terhadap Keamanan Nasional	Pusat Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional UnHan, 2017	Seluruh Infrastruktur Maritim Dasar Laut dapat dimobilisasi jika Negara dalam kondisi krisis atau konflik	Desain infrastruktur dasar Migas di Laut Andaman – Aceh, hendaknya compatible untuk kepentingan Pertahanan Negara	HK
Pertimbangan teknis ekonomis sumber daya migas				
Structural style of the NSB, offshore Aceh	Elders, 2020	Cekungan lepas pantai Sumatera Utara termasuk cekungan yang masih minim eksplorasinya	Kegiatan eksplorasi di laut Andaman akan memperkaya data sumber daya migas	E
The west Andaman fault : a complex strain-partitioning boundary at the seaward edge of the Aceh basin, offshore Sumatra	Martin et al, 2014	Sekalipun bertetangga dekat, sisi bagian utara Pulau Sumatera dengan Utara Timur kepulauan Andaman India, secara geologis tidak memiliki ketersambungan sumber daya migas	Memudahkan eksplorasi migas di sisi Indonesia, yang tidak terkena klaim teknis oleh negara tetangga	E
Uplift and subsidence associated with the great Aceh-Andaman earthquake of 2014	Metzner et al, 2006	Patahan sisi barat gugus Andaman (west andaman fault) terpusah dengan sisi Timur (Sumatran fault). Terjadinya Tsunami 2014 adalah karena pelepasan	Secara geologis, Sumatran fault membatasi NSB, lokasi penelitian dari gugus pulau Andaman. Terjadinya tsunami besar yang lalu, mengurangi tension penumpukan energi	E

		energi di jalur subduksi lempeng Australia ke Sumatera, yang telah lama menumpuk		
Understanding seafloor and recent seismic architectures to depositional models for deepwater exploration in the NSB	Hakim et al, 2019	Offshore lepas pantai cekungan sumatera utara belum banyak dieksplorasi. Kualitas prediksi reservoir kebanyakan berdasarkan interpretasi survey seismik 2 dimensi	Untuk meningkatkan presisi prediksi diperlukan berbagai kegiatan eksplorasi di lapangan	E
Acceleration in regional exploration of Indonesia : Requirement for survival	Satyana et al, 2012	Percepatan eksplorasi regional diperlukan dengan memberi kemudahan kemudahan	Peran kebijakan Pemerintah untuk perbaikan fiscal terms serta kemudahan berusaha	E
Tax incentives as the tool for stimulating hard to recover oil reserves deveopment	Sharf dan Borzenkova, 2015	Kebijakan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan gairah eksplorasi	Masukan yang baik untuk usulan kebijakan Public policy	E
A method for estimating yet-to-find in hydrocarbon plays based on historical results of exploration	D Quirck, 2017	Memperkirakan P99 – P50 – P1 dari berbagai prospek, serta mengalikannya dengan resiko prospek masing-masing, dan tingkat proven dari suatu play	Pemodelan akan dipergunakan pada berbagai klaster, dengan mempertimbangkan tingkat seismik dan informasi geologis lainnya	E
Hydrocarbon exploration and production	Jahn, 2008	Estimasi volumetrik baik secara probabilistik maupun deterministik, bervariasi dan	Perhitungan volumetrik dalam disertasi sifatnya adalah untuk kepentingan ilmiah, dan bukan	E

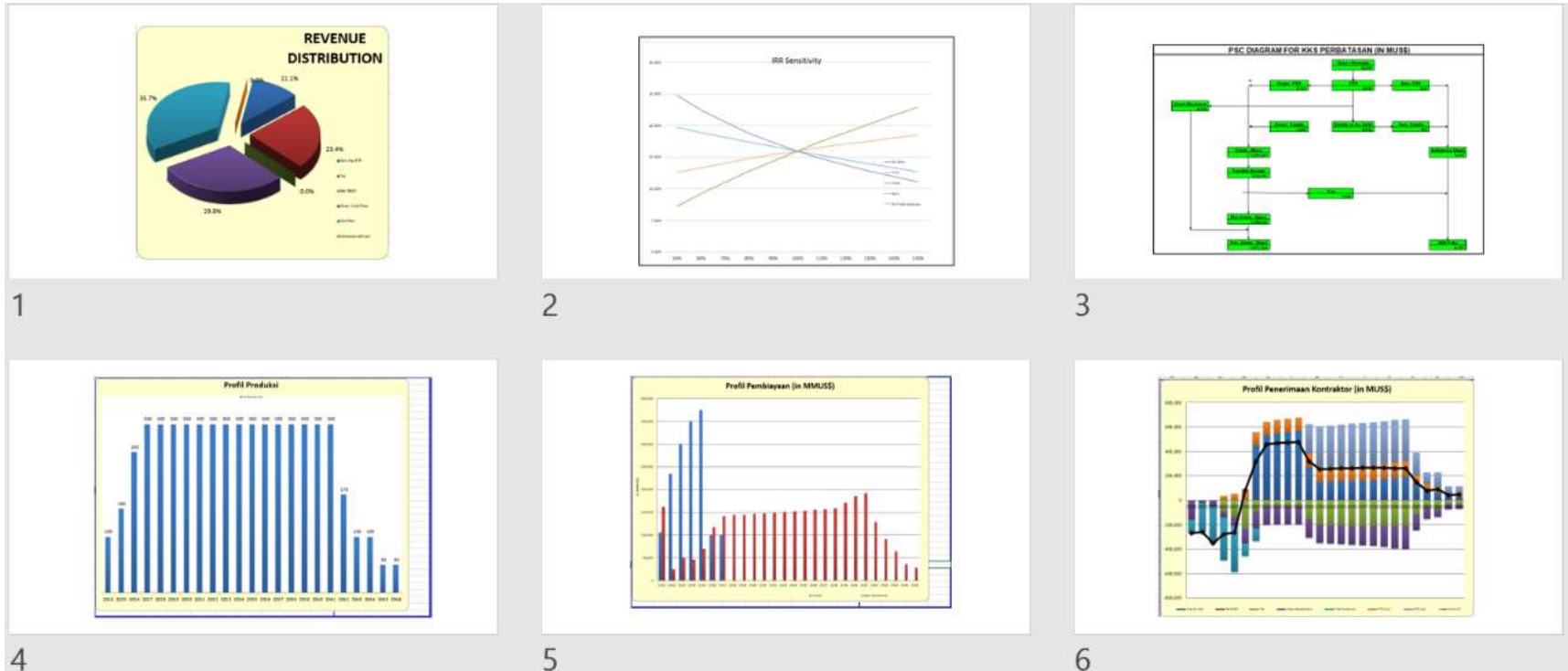
		akan semakin akurat seiring dengan diperolehnya data baru sepanjang umur lapangan	dimaksudkan sebagai rujukan operasional	
Resource assessment of methane hydrate in the eastern nankai trough, Japan	Fujii et al, 2008	Pendekatan perhitungan sumber daya dengan data 2 D dan 3 D dikombinasikan dengan data pemboran eksplorasi	Merupakan disclaimer dalam pendekatan perhitungan, dalam hal tidak ada data pemboran eksplorasi	E
Aspek kebijakan publik dalam pengelolaan sumber daya alam migas				
Community foundations, organizational strategy, and public policy	Graddy dan Morgan, 2006	Organisasi non profit dapat meningkatkan kapasitas masyarakat	Pelibatan masyarakat di daerah operasi migas adalah penting	SB
Process transformation: Limitations to radical organizational change within public service organizations	McNulty, Ferlie 2004	Perubahan organisasi untuk merespon dinamika tuntutan masyarakat memiliki limitasi	Kebijakan yang disarankan agar konseptual dan komprehensif	SB
Better governance and public policy : capacity building for democratic renewal in Africa	Olowu dan Sako, 2002	Tata kelola korporasi adalah faktor penting untuk sustainabilitas	Kebijakan yang disarankan terkait institusi untuk memperhatikan hal ini	SB
The political economy of competitiveness : essay on employment, public policy and	Michie, 2015	Pasar, kompetisi dan inovasi penting untuk meningkatkan output	Bagian dari pembahasan dalam saran	P

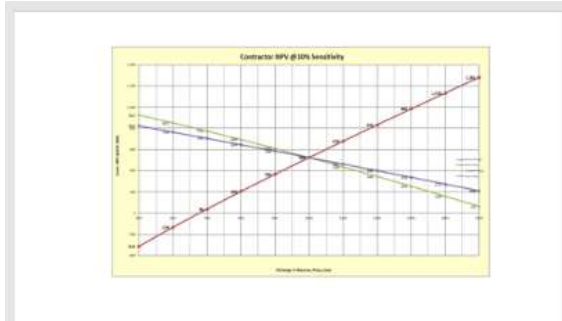
corporate performance				
The theory of local public goods	Stiglitz, 1977	Modifikasi teori barang publik	Afirmasi kepada masyarakat lokal ada justifikasinya	E
Cost benefit analysis for public sector decision makers	Fuguitt dan Wilcox, 1999	Variabel, indikator, perspektif serta objektif kepentingan publik dengan kepentingan korporasi, memiliki sudut pandang yang berbeda tekanannya	Merupakan justifikasi untuk usulan kebijakan dalam hal Kebijakan publik perlu memberikan afirmasi dan subsidi kepada sektor privat	E
Management authority of oil and gas resources in Aceh territory after signing the government regulation nr 23 year 2015	Yahya & Nurdin, 2020	Pelibatan berbagai kalangan diperlukan untuk mengimplementasikan kewenangan pemerintah Aceh di bidang migas	Bahan kajian dalam kewenangan BPMA	SB
The mix ownership corporation as an instrument of public policy	Brooks, 1987	Kepemilikan Pemerintah dalam korporasi untuk efektifnya instrumen kebijakan publik	Bagian pembahasan kebijakan publik	SB
The conspicuous corporation : Business, public policy, and representative democracy	Mitchel and Mitchel, 1987	Bisnis dan politik adalah keniscayaan	Korporasi pengembalian amanat publik harus sinergis dengan kebijakan Pemerintah	P
Enterpreneurship, economic growth and public policy	Acs & Szerb, 2007	Hubungan enterpreneurship, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik	Peningkatan human capital adalah kunci. Untuk saran kebijakan	SB
Public attitudes on	David J.	<i>Trade off</i> antara kualitas	Keseimbangan kehati hatian	E

environment, energy and the economy – implications for policy	Rosen, 1981	lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan output energi	dalam kebijakan. Bagian dari wawancara pada disertasi	
Management of oil and gas resources in Alberta : an economic evaluation of public policy	Michael Crommelin et al, 1978	Evaluasi kebijakan publik yang berdampak kepada kegiatan migas	Memperkaya perspektif instrumen kebijakan publik	E
On the political economy of the state, the public private nexus and industrial policy	Pitelis, 2011	Aktor dalam perekonomian negara, korporasi publik dan privat, antisipasi kegagalan pasar	Perpaduan sistem dan intervensi kebijakan. Bahan lanjut dalam wawancara	E
Manajemen Sumber daya manusia	Marnis, 2008	Keseimbangan antara mempromosikan human resources dan natural resources	Untuk saran dan bahan wawancara	SB
Green talent management to unlock sustainability in the oil and gas sector	Bhaskar et al, 2019	Pentingnya sumber daya manusia untuk kestabilan industri migas	Bahan dalam wawancara	SB
Transforming rural communities in Tiongkok and beyond : community entrepreneurship and enterprises, infrastructure development and	Ying Zhu et al, 2019	Peran strategi pembangunan infrastruktur sebagai pengungkit ekonomi	Bahan untuk saran dan wawancara	P

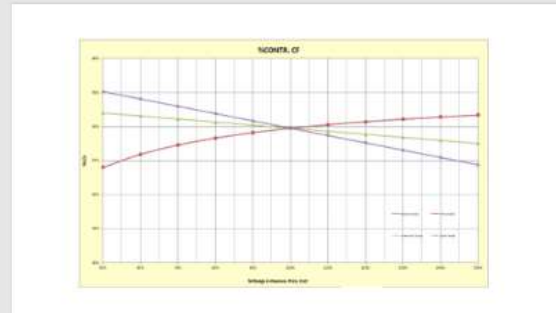
investment modes				
Fiscal policies in oil and gas sector : quantitative assessment of impact of royalty terms on proved reserve estimation	Ukauku Ikwan, 2016	Pemodelan fiscal terms untuk merespon perubahan reserves dan harga	Bahan untuk saran dan wawancara	E
Sequencing offshore oil and gas fields under uncertainty	Jornsten, 1992	Pemodelan dan proyeksi untuk mengantisipasi perubahan jangka panjang cadangan dan harga migas	Bagian dari asumsi dalam pendekatan kuantitatif	E
An analysis of petroleum contract renegotiation under changed circumstances	Zangeneh, 2016	Renegosiasi Kontrak Migas karena ada perubahan substansial	Bagian dari saran kebijakan	E

Lampiran 2 : Bagan-Bagan Keekonomian

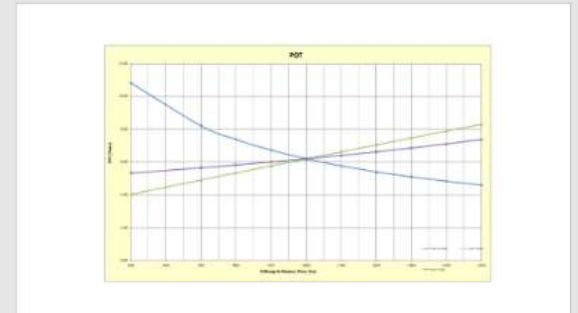




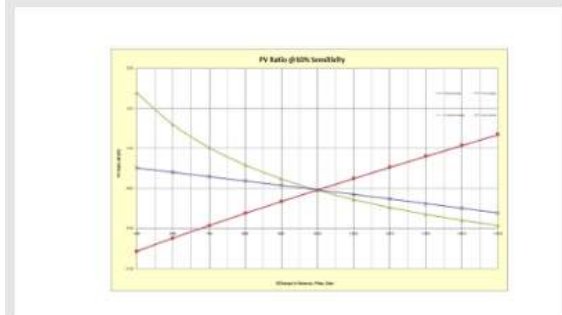
7



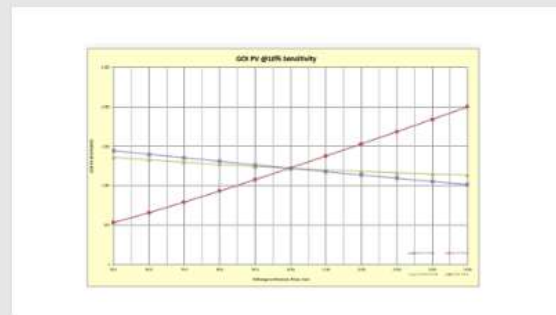
8



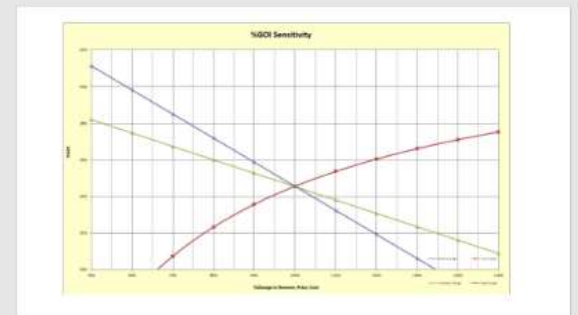
9



10



11



12

Lampiran 3 : Contoh lengkap Tahapan AHP

Responden : K 17

1. Level 1 (Kriteria Utama)

No	Elemen	Singkatan
1	Ideologi	Ideo
2	Politik	Pol
3	Ekonomi	Eko
4	Sosial Budaya	SosBud
5	Pertahanan Keamanan	Hankam

- a. Membuat matriks perbandingan berpasangan antar kriteria utama (terdapat 5 elemen pada kriteria utama yang nantinya akan difokuskan pada 2 bidang yakni Pertahanan dan Keamanan (Hankam) dan Non Pertahanan dan Keamanan (Non-Hankam) tanpa mengubah hasil perbandingan responden.

Pairwise Comparison Level 1

	Ideo	Pol	Eko	SosBud	Hankam
Ideo	1	3	1/2	4	1
Pol	1/3	1	1/8	1/4	1/8
Eko	2	8	1	8	1
SosBud	1/4	4	1/8	1	1/5
Hankam	1	8	1	5	1

- b. Membuat prioritas kriteria dengan menentukan eigen vector
Mengkuadratkan matriks dalam bentuk desimal

	Ideo	Pol	Eko	SosBud	Hankam
Ideo	1.0000	3.0000	0.5000	4.0000	1.0000
Pol	0.3333	1.0000	0.1250	0.2500	0.1250
Eko	2.0000	8.0000	1.0000	8.0000	1.0000
SosBud	0.2500	4.0000	0.1250	1.0000	0.2000
Hankam	1.0000	8.0000	1.0000	5.0000	1.0000

- 1) Membuat prioritas kriteria dengan menentukan eigen vector

Normalisasi matriks dengan menjumlahkan setiap baris pada matriks hasil pengkuadratan (Total), kemudian menentukan eigen vector dengan cara

menjumlahkan normalisasi matriks dan membagi masing – masing baris matriks pada normalisasi terhadap total nilai pada normalisasi matriks.

	Ideo	Pol	Eko	SosBud	Hankam	Total	Eigen Vector
Ideo	5.0000	34.0000	2.8750	17.7500	3.6750	63.3000	0.2128
Pol	1.1042	5.0000	0.5729	3.4583	0.7583	10.8938	0.0366
Eko	9.6667	62.0000	5.0000	31.0000	6.6000	114.2667	0.3841
SosBud	2.2833	11.3500	1.0750	5.0000	1.2750	20.9833	0.0705
Hankam	7.9167	47.0000	4.1250	24.0000	5.0000	88.0417	0.2960
Total						297.4854	1.0000

a. Prioritas kriteria berdasarkan urutan besaran eigen vector.

Pairwise Comparison Level 1

	Ideo	Pol	Eko	SosBud	Hankam	Priority Vector
Ideo	1	3	1/2	4	1	0.2128
Pol	1/3	1	1/8	1/4	1/8	0.0366
Eko	2	8	1	8	1	0.3841
SosBud	1/4	4	1/8	1	1/5	0.0705
Hankam	1	8	1	5	1	0.2960

Menurut responden K-17, Kriteria Ekonomi memiliki prioritas terpenting pertama, sedangkan kriteria Politik merupakan prioritas terpenting terakhir dibandingkan kriteria lainnya, Pertahanan Keamanan, Ideologi dan Sosial Budaya.

b. Menguji indeks konsistensi dan konsistensi rasio.

	Ideo	Pol	Eko	SosBud	Hankam	Eigen Vector	
Ideo	1.0000	3.0000	0.5000	4.0000	1.0000	0.2128	1.0928
Pol	0.3333	1.0000	0.1250	0.2500	0.1250	0.0366	0.2102
Eko	2.0000	8.0000	1.0000	8.0000	1.0000	0.3841	1.9629
SosBud	0.2500	4.0000	0.1250	1.0000	0.2000	0.0705	0.3774
Hankam	1.0000	8.0000	1.0000	5.0000	1.0000	0.2960	1.5385

x =

$$t = \frac{1}{5} \left[\frac{1.098}{0.2128} + \frac{0.2102}{0.0366} + \frac{1.9629}{0.3841} + \frac{0.3774}{0.0705} + \frac{1.5385}{0.2960} \right] = 5.3070$$

$$CI = \frac{t-n}{n-1} = \frac{5.3070-5}{5-1} = 0.0767$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.0767}{1.12} = 0.069$$

Karena $CR < 0,1$ artinya Jawaban Responden Konsisten.

Random Index (RI):

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Sumber: Saaty (1990).

1. Level 2 (Sub Kriteria 1)
 - a. Membuat prioritas antar sub kriteria 1 kaitannya dengan kriteria utama (sama dengan langkah 1-4 Level 1)
 - 1) Kaitannya dengan Aspek Ideologi
 - 2) Kaitannya dengan Aspek Politik
 - 3) Kaitannya dengan Aspek Ekonomi
 - 4) Kaitannya dengan Aspek Sosiasl Budaya
 - 5) Kaitannya dengan Aspek Pertahanan dan Keamanan

Pairwise Comparison Level 2

Bidang		ES	EE	EvS	Priority vector	CI	CR	
Non Hankam	Ideologi						0.0681	0.1174
	ES	1	3	1	0.4639			
	EE	1/3	1	1	0.2165	Konsisten		
	EvS	1	1	1	0.3196			
	Politik						0.0681	0.1174
	ES	1	3	1	0.4639			
	EE	1/3	1	1	0.2165	Konsisten		
	EvS	1	1	1	0.3196			
	Ekonomi						0.0681	0.1174
	ES	1	3	1	0.4639			
	EE	1/3	1	1	0.2165	Konsisten		
	EvS	1	1	1	0.3196			
	Sosial Budaya						-	-
	ES	1	1	1	0.3333			
	EE	1	1	1	0.3333	Konsisten		
	EvS	1	1	1	0.3333			
Hankam	Pertahanan Keamanan						0.0408	0.07
	ES	1	7	1	0.5156			
	EE	1/7	1	1/3	0.0938	Konsisten		
	EvS	1	3	1	0.3905			

b. Membuat total prioritas dengan memodifikasi 5 elemen kriteria utama menjadi 2 bidang kelompok Hankam dan Non Hankam (Aspek Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya). Tujuannya untuk memfokuskan prioritas berdasarkan faktor pertahanan dan keamanan. Menghitung **Total Prioritas** Sub Kriteria 1 terhadap kriteria utama dilakukan dengan menyintesis **bobot tiap sub kriteria 1** yakni Hankam

dan Non Hankam (untuk non hankam bobot yang digunakan adalah **bobot rata – rata dari eigen vector pada aspek Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya** pada masing – masing elemen sub kriteria 1) dengan **bobot kriteria utama** yakni mengelompokkan bobot hankam dan Non Hankam (untuk non Hankam bobot yang digunakan adalah **penjumlahan bobot pada aspek Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya**). Modifikasi AHP dengan menggunakan eigen vector ini dilakukan dengan tujuan memperoleh fokus bidang Hankam dan Non Hankam tanpa mengubah skala responden namun hasil prioritas tetap dipertahankan bernilai 1.

Bobot Sub Kriteria 1

Total Priority Sub Kriteria 1 terhadap Kriteria Utama

	Ideo	Pol	Eko	SosBud	Hankam
ES	0.4639	0.4639	0.4639	0.3333	0.5156
EE	0.2165	0.2165	0.2165	0.3333	0.0938
EvS	0.3196	0.3196	0.3196	0.3333	0.3905



	Non Hankam	Hankam
ES	0.4313	0.5156
EE	0.2457	0.0938
EvS	0.3230	0.3905

Bobot Kriteria Utama

	Eigen Vector
Ideo	0.2128
Pol	0.0366
Eko	0.3841
SosBud	0.0705
Hankam	0.2960



EV Kriteria
0.7040
0.2960

Sintesis 1 (Kriteria dan Sub Kriteria 1)

Sintesis 1 (Kriteria dan Sub Kriteria 1)

	Non Hankam	Hankam	Total Priority
	0.7040	0.2960	
ES	0.4313	0.5156	0.4562
EE	0.2457	0.0938	0.2008
EvS	0.3230	0.3905	0.3430

2. Level 3 (Sub Kriteria 2)

a. Membuat prioritas antar sub kriteria 2 kaitannya dengan sub kriteria 1 (sama dengan langkah 1-4 Level 1)

- 1) Kaitannya dengan Energy Security
- 2) Kaitannya dengan Energy Equity
- 3) Kaitannya dengan Environmental Sustainability

Pairwise Comparison Level 3

					Priority Vector	CI	CR
Energy Security						0.0268	0.0463
	KI	DPL	PE				
KI	1	1	1	0.3276	Konsisten		
DPL	1	1	2	0.4138			
PE	1	1/2	1	0.2586			
Energy Equity						0.0558	0.0963
	AL	HL	HB				
AL	1	3	9	0.6554	Konsisten		
HL	1/3	1	8	0.2962			
HB	1/9	1/8	1	0.0484			
Environmental Sustainability						0.0268	0.05
	IEF	PLRK	Em				
IEF	1	2	1	0.4138	Konsisten		
PLRK	1/2	1	1	0.2586			
Em	1	1	1	0.3276			

b. Membuat total prioritas dari Sintesis sub kriteria 1 dan kriteria utama terhadap sub kriteria 2 dengan cara sintesis.

Sintesis 2 (Sintesis 1 dan Sub Kriteria 2)

	ES	Total Priority
	0.4562	
KI	0.3276	0.1495
DPL	0.4138	0.1888
PE	0.2586	0.1180
	EE	Total Priority
	0.2008	
AL	0.6554	0.1316
HL	0.2962	0.0595
HB	0.0484	0.0097
	EvS	Total Priority
	0.3430	
IEF	0.4138	0.1419
PLRK	0.2586	0.0887
Em	0.3276	0.1124

3. Level 4 (Alternatif)

a. Membuat prioritas antar alternatif dengan sub kriteria 2 (sama dengan langkah 1-4 Level 1)

- 1) Kaitannya dengan Ketergantungan Impor
- 2) Kaitannya dengan Diversifikasi Pembangkit Listrik
- 3) Kaitannya dengan Penyimpanan Energi
- 4) Kaitannya dengan Akses Ke Listrik
- 5) Kaitannya dengan Harga Listrik
- 6) Kaitannya dengan Harga BBM
- 7) Kaitannya dengan Intensitas Energi Final
- 8) Kaitannya dengan Pembangkit Listrik Rendah Karbon
- 9) Kaitannya dengan Emisi CO₂ per Kapita

Pairwise Comparison Level 4 (Alternative)

						Priority Vector	CI	CR
Ketergantungan Impor (Energy Security)							0.0812	0.0902
	Reg	SDM	Infras	MKM				
Reg	1	2	1/2	1	0.2363			
SDM	1/2	1	1	1	0.2073	Konsisten		
Infras	2	1	1	3	0.3802			
MKM	1	1	1/3	1	0.1762			
Diversifikasi Pembangkit Listrik (Energy Security)							0.0810	0.0900
	Reg	SDM	Infras	MKM				
Reg	1	1	1/2	3	0.2498			
SDM	1	1	1	1	0.2360	Konsisten		
Infras	2	1	1	4	0.3918			
MKM	1/3	1	1/4	1	0.1224			
Penyimpanan Energi (Energy Security)							0.0625	0.0695
	Reg	SDM	Infras	MKM				
Reg	1	1	1/2	1	0.1885			
SDM	1	1	1	1	0.2396	Konsisten		
Infras	2	1	1	4	0.4089			
MKM	1	1	1/4	1	0.1629			
Akses ke Listrik (Energy Equity)							0.0522	0.0580
	Reg	SDM	Infras	MKM				
Reg	1	1	1/3	1	0.1724			
SDM	1	1	1	1	0.2414	Konsisten		
Infras	3	1	1	3	0.4138			
MKM	1	1	1/3	1	0.1724			
Harga Listrik (Energy Equity)							0.0812	0.0902
	Reg	SDM	Infras	MKM				
Reg	1	2	1/2	1	0.2363			
SDM	1/2	1	1	1	0.2073	Konsisten		
Infras	2	1	1	3	0.3802			
MKM	1	1	1/3	1	0.1762			

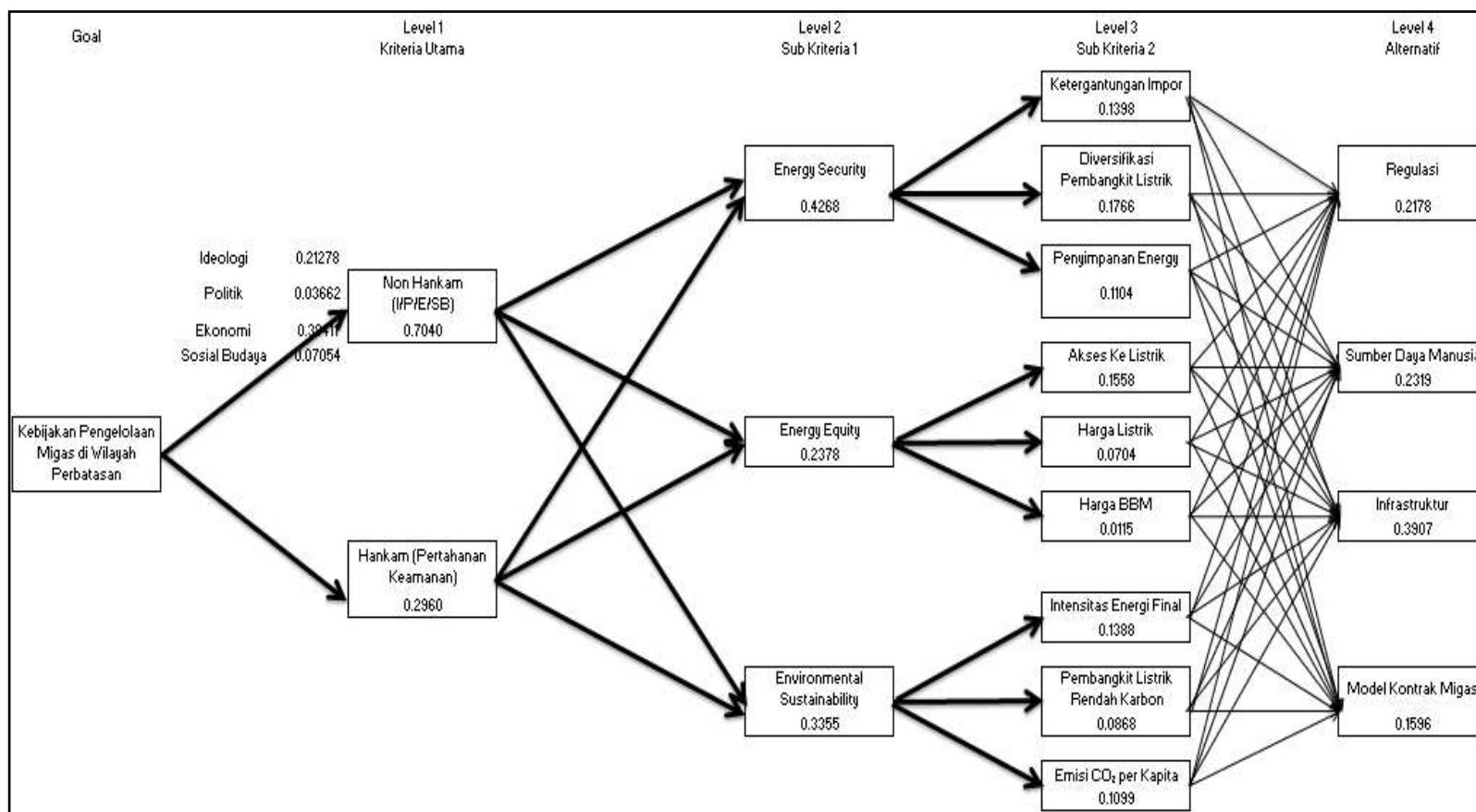
Harga Listrik (Energy Equity)						0.0812	0.0902
	Reg	SDM	Infras	MKM			
Reg	1	2	1/2	1	0.2363		
SDM	1/2	1	1	1	0.2073	Konsisten	
Infras	2	1	1	3	0.3802		
MKM	1	1	1/3	1	0.1762		
Harga BBM (Energy Equity)						0.0696	0.0773
	Reg	SDM	Infras	MKM			
Reg	1	2	1/2	2	0.2737		
SDM	1/2	1	1	1	0.2032	Konsisten	
Infras	2	1	1	3	0.3789		
MKM	1/2	1	1/3	1	0.1442		
Intensitas Energi Final (Environmental Sustainability)						0.0396	0.0440
	Reg	SDM	Infras	MKM			
Reg	1	1	1/2	1	0.1955		
SDM	1	1	1	1	0.2432	Konsisten	
Infras	2	1	1	3	0.3818		
MKM	1	1	1/3	1	0.1795		
Pembangkit Listrik Rendah Karbon (Environmental Sustainability)						0.0718	0.0798
	Reg	SDM	Infras	MKM			
Reg	1	1	1/2	3	0.2593		
SDM	1	1	1	1	0.2366	Konsisten	
Infras	2	1	1	3	0.3704		
MKM	1/3	1	1/3	1	0.1337		
Emisi CO ₂ per Kapita (Environmental Sustainability)						0.0723	0.0804
	Reg	SDM	Infras	MKM			
Reg	1	1	1/3	2	0.2146		
SDM	1	1	1	1	0.2361	Konsisten	
Infras	3	1	1	2	0.3863		
MKM	1/2	1	1/2	1	0.1631		

- b. Membuat Prioritas Global dengan mengalikan bobot tiap alternatif dengan bobot hasil sintesis 2.

Global Priority

	KI	DPL	PE	AL	HL	HB	IEF	PLRK	Em	GP
	0.1495	0.1888	0.1180	0.1316	0.0595	0.0097	0.1419	0.0887	0.1124	
Reg	0.2363	0.2498	0.1885	0.1724	0.2363	0.2737	0.1955	0.2593	0.2146	0.2190
SDM	0.2073	0.2360	0.2396	0.2414	0.2073	0.2032	0.2432	0.2366	0.2361	0.2319
Infras	0.3802	0.3918	0.4089	0.4138	0.3802	0.3789	0.3818	0.3704	0.3863	0.3902
MKM	0.1762	0.1224	0.1629	0.1724	0.1762	0.1442	0.1795	0.1337	0.1631	0.1589

c. Menuliskan hasil prioritas global pada pohon AHP untuk menentukan pengambilan keputusan Kebijakan Pengelolaan Migas di Wilayah Perbatasan.



Lampiran 4 : Hasil Lengkap Perhitungan Modified AHP

A	B	C	Level 2																							
			Sub-Kriteria 2																	Energy Security						
			Environmental Sustainability				TP													Ketahanan Energi			Diversifikasi Pembangkit Listrik			
			Intensitas Energi/Final	Pembangkit Listrik Rendah Karbon	Emit/CO ₂ per Kapita	CR	Ketersediaan Input	Diversifikasi Pembangkit Listrik	Penyempitan Energi	Akses Ke Listrik	Harga Listrik	Harga BBM	Intensitas Energi Final	Pembangkit Listrik Rendah Karbon	Emit/CO ₂ per Kapita	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Korasi Pijar	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Korasi Pijar	CR	
K-01	Peneliti R&D Utama Badan Survei dan Geologi	Kebijakan Pengelolaan	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.1966	0.1966	0.1966	0.0705	0.0705	0.0705	0.0758	0.0758	0.0758	0.1900	0.2002	0.3401	0.2457	0.0688	0.2625	0.2036	0.4012	0.1217	0.2938	
K-02	Diri/ke Lead	Manajemen	0.0776	0.1123	0.0702	0.0488	0.0545	0.0982	0.2431	0.1981	0.1989	0.0738	0.2481	0.0341	0.0213	0.2788	0.0794	0.1404	0.4942	0.0898	0.4384	0.1438	0.0712	0.2888	0.2904	
K-03	Manajemen	Manajemen	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.0874	0.1094	0.0820	0.1190	0.1505	0.1505	0.0930	0.0910	0.0910	0.1844	0.2044	0.3267	0.2844	0.0758	0.2457	0.2982	0.3401	0.1880	0.0585	
K-04	Manajemen	Manajemen	0.2586	0.3278	0.4708	0.0483	0.1252	0.0703	0.0391	0.0816	0.0572	0.0725	0.1232	0.1560	0.1870	0.2095	0.2388	0.4138	0.1440	0.0805	0.2737	0.2032	0.3185	0.1442	0.0773	
K-05	Deputi Indagasi/Geofisika	Manajemen	0.2586	0.3278	0.4708	0.0483	0.0985	0.1044	0.1078	0.0652	0.0826	0.1044	0.1166	0.1464	0.1850	0.2457	0.2002	0.3401	0.1980	0.0688	0.2644	0.2044	0.3267	0.1844	0.0790	
K-06	Setoran Badan Geologi	Manajemen	0.4138	0.2586	0.3278	0.0483	0.0824	0.1044	0.1018	0.1132	0.1430	0.0894	0.1383	0.0898	0.1100	0.4401	0.0594	0.0573	0.4712	0.0698	0.5862	0.2674	0.0544	0.1280	0.0811	
K-07	Deputi	Manajemen	0.4138	0.2586	0.3278	0.0483	0.1275	0.0797	0.1003	0.1477	0.0253	0.1070	0.1388	0.0866	0.1037	0.2053	0.2366	0.4738	0.1440	0.0805	0.3776	0.2025	0.3437	0.1371	0.0834	
K-08	Deputi	Manajemen	0.4138	0.2586	0.3278	0.0483	0.1460	0.0983	0.1168	0.0806	0.1021	0.1289	0.1388	0.0868	0.1099	0.1629	0.2336	0.4089	0.1885	0.0898	0.2615	0.2036	0.4012	0.1317	0.0938	
K-09	Manajemen	Manajemen	0.2586	0.3278	0.4708	0.0483	0.0874	0.1230	0.1083	0.0553	0.0708	0.0885	0.1250	0.1520	0.2013	0.2095	0.2388	0.4138	0.1440	0.0805	0.2818	0.2432	0.3208	0.1945	0.0436	
K-10	Kemistri Utama	Manajemen	0.1789	0.1373	0.0898	0.0485	0.0165	0.2100	0.0943	0.1963	0.1963	0.1963	0.0728	0.0109	0.0080	0.1017	0.2635	0.4012	0.2028	0.0938	0.2888	0.1016	0.1417	0.4678	0.0980	
K-11	Manajemen	Manajemen	0.4961	0.3761	0.1938	0.0483	0.0338	0.1753	0.1036	0.0383	0.1151	0.0283	0.2456	0.1560	0.0575	0.2005	0.1652	0.5084	0.1273	0.0634	0.2528	0.3076	0.2388	0.2070	0.0888	
K-12	Survei/Manajemen	Manajemen	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.0966	0.0718	0.1267	0.0288	0.0288	0.0288	0.2108	0.2108	0.2108	0.2783	0.2385	0.0461	0.4388	0.0852	0.2782	0.4543	0.0856	0.2102	0.0985	
K-13	Survei/Manajemen	Manajemen	0.1538	0.4961	0.3301	0.0483	0.0227	0.1238	0.0531	0.0525	0.1207	0.0488	0.1027	0.2886	0.1804	0.1623	0.2020	0.2848	0.3510	0.0823	0.0832	0.2844	0.2185	0.1930	0.0481	
K-14	Manajemen	Manajemen	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.1055	0.1055	0.1055	0.1930	0.1206	0.0164	0.1172	0.1172	0.1172	0.0848	0.2020	0.3510	0.1623	0.0832	0.2844	0.2044	0.3267	0.1844	0.0738	
K-15	Deputi/Manajemen	Manajemen	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.0883	0.1088	0.1375	0.0330	0.1288	0.0789	0.1082	0.1082	0.1082	0.2146	0.2361	0.3883	0.1631	0.0884	0.3053	0.1986	0.1531	0.1023	0.0955	
K-16	Manajemen/Manajemen	Manajemen	0.2586	0.3278	0.4708	0.0483	0.0784	0.0764	0.0784	0.1622	0.1622	0.1622	0.0738	0.0931	0.1178	0.1628	0.1886	0.2382	0.2945	0.0874	0.2383	0.2073	0.3882	0.1762	0.0902	
K-17	General Manager	Manajemen	0.4138	0.2586	0.3278	0.0483	0.1398	0.1168	0.1164	0.1558	0.0784	0.0195	0.1388	0.0888	0.1039	0.2361	0.2073	0.3882	0.1762	0.0902	0.2438	0.1288	0.3318	0.1224	0.0900	
K-18	Manajemen/Manajemen	Manajemen	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.1174	0.1174	0.1174	0.1821	0.1156	0.0169	0.1107	0.1107	0.1107	0.2422	0.2422	0.3480	0.1638	0.0458	0.2488	0.2360	0.3318	0.1024	0.0900	
K-19	Inspektur/Manajemen	Manajemen	0.3333	0.1372	0.5578	0.0485	0.0323	0.2238	0.1018	0.1123	0.1123	0.1123	0.1123	0.0970	0.0401	0.1852	0.2844	0.3267	0.1844	0.2044	0.0758	0.2388	0.1857	0.1985	0.4388	0.0782
K-20	Perencana/Manajemen	Manajemen	0.3278	0.2586	0.4708	0.0483	0.1592	0.2011	0.1257	0.0548	0.0895	0.0678	0.0988	0.0781	0.1248	0.1882	0.0572	0.4453	0.1374	0.0716	0.4180	0.0597	0.3877	0.1725	0.0947	

A	B	C	Level 4 Alternatif																								
			AV	AV1	AV2	AV3	AV4	AV5	AV6	AV7	AV8	AV9	AV10	AV11	AV12	AV13	AV14	AV15	AV16	AV17	AV18	AV19	AV20	AV21	AV22	AV23	AV24
			Perencanaan Energi				Akses Ke Listrik				Harga Listrik				Harga BBM				Investasi Energi Final								
			Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Risiko Korupsi Mgras	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Risiko Korupsi Mgras	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Risiko Korupsi Mgras	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Risiko Korupsi Mgras	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Risiko Korupsi Mgras	CR
K-01	Paralel Arah Utama Bata Transportasi Laut	Kebijakan Pengelolaan Risiko & Wilayah Pektasan	0.2503	0.2366	0.3704	0.1337	0.0790	0.2363	0.2073	0.3602	0.1762	0.0502	0.2363	0.2073	0.3602	0.1762	0.0502	0.2361	0.1902	0.3433	0.2704	0.0795	0.2381	0.1652	0.3433	0.2704	0.0793
K-02	Offshore Lead		0.5213	0.0347	0.3817	0.0623	0.0895	0.2857	0.1429	0.2657	0.2857	0.0000	0.2835	0.2096	0.1917	0.4892	0.0938	0.2857	0.1429	0.2857	0.2857	0.0000	0.0697	0.0323	0.4490	0.4490	0.8828
K-03	Bidang Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga		0.2503	0.2366	0.3704	0.1337	0.0790	0.2044	0.2044	0.3267	0.1844	0.0798	0.2044	0.2044	0.3267	0.1844	0.0798	0.2737	0.2032	0.3789	0.1442	0.0773	0.2891	0.1964	0.3788	0.1276	0.0910
K-04	Masyarakat		0.2498	0.2360	0.3393	0.1274	0.0900	0.1993	0.2432	0.3039	0.1799	0.0440	0.2748	0.2396	0.3490	0.1406	0.0685	0.2635	0.2036	0.4012	0.1317	0.0336	0.2496	0.2360	0.3393	0.1274	0.0900
K-05	Departemen geoteknik		0.2944	0.2044	0.3267	0.1844	0.0796	0.1995	0.2432	0.3039	0.1799	0.0440	0.2737	0.2032	0.3789	0.1442	0.0773	0.3176	0.2025	0.3427	0.1371	0.0594	0.3048	0.2390	0.3039	0.1260	0.0763
K-06	Sekretariat Badan Geologi		0.4875	0.4128	0.0390	0.9887	0.0880	0.4881	0.3728	0.0488	0.0885	0.8930	0.5094	0.3803	0.0403	0.0700	0.8941	0.3254	0.4886	0.0327	0.8582	0.0324	0.9381	0.2771	0.0527	0.9071	0.0902
K-07	Dozen		0.2944	0.2044	0.3267	0.1844	0.0796	0.2898	0.2432	0.3205	0.1545	0.0436	0.2944	0.2944	0.3267	0.1844	0.0798	0.2748	0.2396	0.3490	0.1406	0.0685	0.2496	0.2360	0.3393	0.1274	0.0900
K-08	Dozen		0.2638	0.2036	0.4012	0.1317	0.0938	0.2748	0.2396	0.3490	0.1406	0.0685	0.2383	0.2073	0.3602	0.1762	0.0502	0.2737	0.2032	0.3789	0.1442	0.0773	0.2891	0.1964	0.3788	0.1276	0.0910
K-09	offshore specialist		0.2383	0.2073	0.3602	0.1762	0.0502	0.2686	0.2362	0.3657	0.1299	0.0240	0.2944	0.2944	0.3267	0.1844	0.0798	0.2737	0.2032	0.3789	0.1442	0.0773	0.2891	0.1964	0.3788	0.1276	0.0910
K-10	Konvensi Utama		0.2541	0.0484	0.2994	0.4020	0.0662	0.2628	0.0458	0.2988	0.3029	0.0690	0.2684	0.1975	0.4537	0.3600	0.0768	0.2912	0.0778	0.1644	0.4676	0.0967	0.1982	0.4388	0.2325	0.0771	0.0986
K-11	Amala		0.2949	0.2491	0.3333	0.1867	0.0926	0.2457	0.2082	0.1880	0.3481	0.0686	0.2386	0.3078	0.2070	0.2526	0.0688	0.2063	0.1722	0.3311	0.2594	0.0685	0.2451	0.3333	0.1867	0.2543	0.0926
K-12	Sal AhMFRRI		0.2907	0.4196	0.0580	0.2326	0.0988	0.1852	0.2407	0.3333	0.2407	0.0573	0.2500	0.2500	0.2500	0.0000	0.2500	0.2500	0.2500	0.0000	0.2945	0.4332	0.0401	0.1818	0.0333		
K-13	Sal Hkuzo ment pap dan doon Hkuzo TRDAKTI		0.1029	0.4436	0.2022	0.2495	0.0806	0.1091	0.3912	0.2143	0.3254	0.0436	0.2394	0.1971	0.4149	0.1488	0.0634	0.1627	0.1763	0.3511	0.3779	0.0436	0.1475	0.4262	0.2317	0.1945	0.0710
K-14	Masyarakat		0.2635	0.2036	0.4012	0.1317	0.0939	0.2748	0.2396	0.3490	0.1406	0.0685	0.2944	0.2944	0.3267	0.1844	0.0798	0.2737	0.2032	0.3789	0.1442	0.0773	0.2496	0.2360	0.3393	0.1274	0.0900
K-15	Dozen LGM /Midi Rakte bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemitraan		0.3691	0.2018	0.1630	0.1285	0.0954	0.2044	0.2044	0.3267	0.1844	0.0798	0.2457	0.2982	0.3488	0.1980	0.0686	0.2383	0.2073	0.3602	0.1762	0.0502	0.2891	0.1964	0.3788	0.1276	0.0910
K-16	Peraturan Profesional MGRS		0.2886	0.2140	0.2081	0.2896	0.0807	0.1990	0.3087	0.2963	0.1980	0.0206	0.3016	0.2526	0.2070	0.2396	0.0688	0.2099	0.1739	0.2464	0.2899	0.0224	0.2496	0.2360	0.3393	0.1274	0.0900
K-17	General Manager		0.1895	0.2306	0.4089	0.1629	0.0895	0.1724	0.2414	0.4138	0.1724	0.0586	0.2383	0.2073	0.3602	0.1762	0.0502	0.2737	0.2032	0.3789	0.1442	0.0773	0.1995	0.2432	0.3818	0.1795	0.0440
K-18	Puakawanan TM		0.2355	0.2355	0.3610	0.1677	0.0326	0.1857	0.2388	0.4388	0.1905	0.0782	0.1885	0.2396	0.4089	0.1629	0.0685	0.2635	0.2036	0.4012	0.1317	0.0336	0.2891	0.1964	0.3788	0.1276	0.0910
K-19	Inspeksi II - KESDM		0.2407	0.3333	0.1952	0.2407	0.0573	0.3529	0.2363	0.1765	0.2353	0.0928	0.3016	0.2526	0.2070	0.2396	0.0688	0.4586	0.1710	0.2282	0.1436	0.0493	0.3872	0.2387	0.2778	0.1235	0.0710
K-20	Pengajaran kulu mgar		0.2397	0.1994	0.3799	0.1278	0.0910	0.3885	0.0572	0.4373	0.1290	0.0294	0.3786	0.0476	0.4398	0.1410	0.0880	0.2045	0.1783	0.5794	0.0880	0.0940	0.2628	0.0818	0.4305	0.1857	0.0916

A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL
Kode Responden	Profesi/Jabatan	Goal	Environmental Sustainability										Global Priority				Alternatif Terpilih	kategori responden	
			Pembangkit Listrik Rendah Karbon				CR	Emisi CO2 per Kapita				CR							
			Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Migas		Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Migas		Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Migas			
			K-01	Peneliti Ahli Utama Bidang Transportasi Laut	Kebijakan Pengelolaan Migas di Wilayah Perbatasan	0.2363	0.2073	0.3802	0.1762	0.0902	0.2363	0.2073	0.3802	0.1762	0.0902	0.2385			0.2039
K-02	Offshore Lead	0.2857	0.1429	0.2857		0.2857	0.0000	0.2857	0.1429	0.2857	0.2857	0.0000	0.2886	0.0971	0.3091	0.3051	Inhas	1	ii
K-03	Peneliti Ahli Utama Bidang Kemasparakatan dan Hubungan Antar Lembaga	0.2363	0.2073	0.3802		0.1762	0.0902	0.2457	0.2082	0.3481	0.1980	0.0686	0.2611	0.2067	0.3534	0.1788	Inhas	1	iv
K-04	Wiaivata	0.2704	0.2361	0.3433		0.1502	0.0739	0.2457	0.2082	0.3481	0.1980	0.0686	0.2460	0.2266	0.3744	0.1530	Inhas	1	ii
K-05	Deputi bidang geoteknik	0.2945	0.2362	0.3526		0.1966	0.0974	0.2363	0.2073	0.3802	0.1762	0.0902	0.2720	0.2162	0.3529	0.1590	Inhas	1	iv
K-06	Sekretaris Badan Geologi	0.3765	0.5150	0.0387		0.0694	0.0914	0.5104	0.3837	0.0351	0.0648	0.0602	0.4756	0.3546	0.0406	0.1293	Reg	1	i
K-07	Dosen	0.2737	0.2032	0.3789		0.1442	0.0773	0.2457	0.2082	0.3481	0.1980	0.0686	0.2656	0.2229	0.3562	0.1554	Inhas	1	vi
K-08	Dosen	0.2748	0.2396	0.3450		0.1406	0.0685	0.2457	0.2082	0.3481	0.1980	0.0686	0.2522	0.2147	0.3787	0.1544	Inhas	1	vi
K-09	offshore specialist	0.2844	0.2044	0.3267		0.1844	0.0738	0.2363	0.2073	0.3802	0.1762	0.0902	0.2631	0.2138	0.3624	0.1607	Inhas	1	ii
K-10	Komisaris Utama	0.1754	0.1540	0.6270		0.0436	0.0991	0.2663	0.1577	0.5231	0.0530	0.0685	0.2701	0.1317	0.2137	0.3845	MKM	1	ii
K-11	Jurnal	0.3529	0.2353	0.2353		0.1765	0.0926	0.2082	0.3481	0.2457	0.1980	0.0686	0.2575	0.2860	0.2375	0.2190	SDM	1	v
K-12	Staf Ahli MPR RI	0.2638	0.4878	0.0403		0.2091	0.0920	0.2700	0.4738	0.0485	0.2096	0.0899	0.2721	0.4477	0.0666	0.2136	SDM	1	v
K-13	Staf khusus menteri pupr dan dosen Maksi TRISAKTI	0.1741	0.3003	0.2457		0.2799	0.0690	0.1755	0.3948	0.2812	0.1486	0.0697	0.1661	0.3305	0.2787	0.2267	SDM	1	iv
K-14	Wiaivata	0.2704	0.2361	0.3433		0.1502	0.0739	0.2457	0.2082	0.3481	0.1980	0.0686	0.2700	0.2187	0.3537	0.1576	Inhas	1	ii
K-15	Dosen UGM/ Wakil Rektor bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan	0.2704	0.2361	0.3433		0.1502	0.0739	0.2844	0.2044	0.3267	0.1844	0.0738	0.2816	0.2091	0.3505	0.1587	Inhas	1	vi
K-16	Pensunan Profesional MIGAS	0.3103	0.1379	0.2414		0.3103	0.0570	0.2526	0.2070	0.3018	0.2386	0.0688	0.2721	0.2149	0.2712	0.2418	Reg	1	ii
K-17	General Manager	0.2593	0.2366	0.3704		0.1337	0.0798	0.2146	0.2361	0.3883	0.1631	0.0604	0.2178	0.2315	0.3907	0.1596	Inhas	1	ii
K-18	Punawitanan TNI	0.2704	0.2361	0.3433		0.1502	0.0739	0.2457	0.2082	0.3481	0.1980	0.0686	0.2325	0.2295	0.3817	0.1563	Inhas	1	ii
K-19	Inspektor IV - KESDM	0.2329	0.2606	0.3868		0.1197	0.0892	0.3693	0.1971	0.3138	0.1199	0.0670	0.3382	0.2216	0.2217	0.2385	Reg	1	i
K-20	Pengamat hukum migas	0.4572	0.0875	0.3723		0.0830	0.0255	0.5822	0.0674	0.2313	0.1191	0.0947	0.3770	0.0857	0.4017	0.1356	Inhas	1	ii

Kode Responden	Profesi/Jabatan	Goal	Level1		CPI	Level2											Energy Security						Energy Equity			
			Non	Harikan		Non Harikan			CBI	Harikan			CBI	TP			Energy Security			CBI	Energy Equity			CBI		
						Energy	Energy	Environmental		Energy	Energy	Environmental		Energy	Energy	Environmental	Ketersediaan	Diversifikasi	Penyelesaian		Risiko Ke-	Haga	Harga		Harga	
			Security	Equity	Sustainability	Security	Equity	Sustainability	Security	Equity	Sustainability	Import	Pembangkit	Energi	Loss	Link	BSM	Link	BSM	Link						
K-21	Pegawai Reges		0.4674	0.5326	0.0628	0.3905	0.2626	0.3269	0.0000	0.3191	0.1638	0.4961	0.0403	0.3477	0.2353	0.4170	0.0588	0.4706	0.4706	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000		
K-22	Executive Director		0.0195	0.1675	0.0737	0.3072	0.2562	0.4525	0.0000	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.3296	0.2945	0.3889	0.5475	0.2895	0.0630	0.0884	0.3276	0.4138	0.2586	0.0463		
K-23	Pengusaha		0.8505	0.1495	0.0665	0.4210	0.3885	0.1905	0.0000	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.4199	0.3691	0.2110	0.1938	0.4961	0.3101	0.0463	0.4138	0.3276	0.2586	0.0463		
K-24	Rektor Universitas Syiah	Kual	0.8522	0.1478	0.0728	0.2612	0.3371	0.3417	0.0000	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.2837	0.3786	0.3286	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000		
K-25	Peneliti Nasional	Intis	0.0186	0.1894	0.0663	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.6907	0.1643	0.1590	0.0251	0.3390	0.3053	0.2997	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000		
K-26	Dirkita Informatika Migas		0.7169	0.2831	0.0659	0.4259	0.3276	0.2425	0.0000	0.4286	0.4286	0.1429	0.0000	0.4286	0.3562	0.2143	0.1474	0.6319	0.2148	0.0937	0.6328	0.0899	0.2773	0.0751		
K-27	Poli		0.8951	0.1049	0.0681	0.3290	0.3897	0.2773	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3295	0.3873	0.2832	0.3276	0.4138	0.2586	0.0463	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000		
K-28	Tanaga Profesional	Lehman RI	0.9651	0.0349	0.0774	0.3340	0.3106	0.3954	0.0000	0.3276	0.4138	0.2586	0.0463	0.3338	0.3142	0.3620	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.2586	0.3276	0.4138	0.0463		
K-29	Deputi Kemendik	Politik	0.6785	0.3215	0.0662	0.3666	0.2862	0.3330	0.0000	0.6802	0.0571	0.2227	0.0749	0.4171	0.2254	0.2975	0.3276	0.4138	0.2586	0.0463	0.2586	0.3276	0.4138	0.0463		
K-30	Dosen Ilmiah		0.8344	0.1656	0.0502	0.3663	0.3015	0.3324	0.0000	0.5570	0.2032	0.2386	0.0768	0.3989	0.2881	0.3171	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000		
K-31	PNJ		0.8363	0.1637	0.0536	0.3019	0.3624	0.3366	0.0000	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.3784	0.3621	0.3184	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.2586	0.3276	0.4138	0.0463		
K-32	Kepala BCU Umam DEN		0.3313	0.6687	0.0762	0.3079	0.3101	0.3880	0.0000	0.2146	0.1474	0.6319	0.0537	0.2436	0.2013	0.5951	0.0526	0.4737	0.4737	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000		
K-33	Staf Ahli Kemendik	PMK	0.8231	0.1769	0.0755	0.2907	0.3509	0.3504	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3048	0.3478	0.3474	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000		
K-34	Manajemen	Enegi	0.7362	0.2638	0.0871	0.1636	0.2201	0.1662	0.0000	0.5401	0.1630	0.2966	0.0079	0.2622	0.2052	0.5326	0.0668	0.7417	0.1916	0.0624	0.0528	0.4737	0.4737	0.0000		
K-35	Manajemen	Bidnes	0.6221	0.3779	0.0831	0.8419	0.1077	0.2904	0.0000	0.4000	0.4000	0.2000	0.0000	0.5925	0.2162	0.2210	0.3030	0.6397	0.2573	0.0334	0.3101	0.1938	0.4961	0.0463		
K-36	Deputi Perencanaan	SKK Migas	0.7838	0.2161	0.0806	0.1950	0.2292	0.2556	0.0000	0.1662	0.0909	0.0909	0.0000	0.5906	0.1993	0.2281	0.3101	0.1938	0.4961	0.0463	0.3101	0.1938	0.4961	0.0463		
K-37	Pegawai		0.8572	0.1428	0.0302	0.2663	0.3214	0.4104	0.0000	0.4286	0.4286	0.1429	0.0000	0.3788	0.3538	0.3294	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000		
K-38	Profesional		0.4543	0.5457	0.0654	0.2915	0.3266	0.3819	0.0000	0.3319	0.1072	0.5310	0.0495	0.3155	0.2232	0.4632	0.2586	0.3276	0.4138	0.0463	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000		

Kode Responden	Profil Jabatan	Goal	Level 3 Sub-Kategori											Energi Bersih											
			Environmental Sustainability				TF							Kategori Input					Diversifikasi Pembangkit Listrik						
			Ineritas Energi Final	Hambatan Listrik Rendah Karbon	Emission CO ₂ per Kapita	CR	Ketersediaan Input	Diversifikasi Pembangkit Listrik	Penyimpanan Energi	Akses ke Listrik	Harga Listrik	Harga O&M	Ineritas Energi Final	Pembangkit Listrik Rendah Karbon	Emission CO ₂ per Kapita	Regulasi	Subsidi Dana Pemerintah	Infrastruktur	Nilai Komoditas Migas	CR	Regulasi	Subsidi Dana Pemerintah	Infrastruktur	Nilai Komoditas Migas	CR
K-21	Pegawai Negeri Sipil/Diklatnas		0.082	0.093	0.093	0.0000	0.0205	0.836	0.836	0.0794	0.0794	0.0794	0.3412	0.0375	0.0375	0.1865	0.3528	0.2945	0.2362	0.0374	0.0623	0.4242	0.4242	0.0890	0.0224
K-22	Executive Director		0.7575	0.8078	0.0747	0.0976	0.2194	0.0946	0.0206	0.0932	0.1077	0.0736	0.2946	0.0653	0.0291	0.2747	0.0933	0.0567	0.0093	0.0095	0.5001	0.1804	0.2660	0.0375	0.0028
K-23	Pengusaha		0.4061	0.3101	0.1938	0.0403	0.0884	0.2003	0.1933	0.1527	0.1209	0.0955	0.1947	0.0654	0.0409	0.2781	0.1623	0.3974	0.1623	0.0226	0.3195	0.1942	0.2540	0.1433	0.0994
K-24	Faktor Universitas Spolia Kuala		0.2586	0.3276	0.4138	0.0463	0.0948	0.0948	0.0948	0.1258	0.1255	0.1255	0.0079	0.1111	0.1405	0.2407	0.2407	0.3333	0.8562	0.0573	0.2443	0.2463	0.2888	0.2890	0.0225
K-25	Perutusan Diplomat fakultas Informatika nasional Unhan		0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.1317	0.1317	0.1317	0.1019	0.1016	0.1016	0.0999	0.0999	0.0999	0.2099	0.2396	0.4156	0.1440	0.0005	0.2363	0.3373	0.3002	0.1762	0.0902
K-26	Direktur Informatika Migas		0.194	0.5236	0.3671	0.0943	0.0630	0.2740	0.0322	0.2254	0.0100	0.0968	0.0258	0.1622	0.0765	0.4098	0.154	0.0900	0.3768	0.0581	0.2730	0.0907	0.2021	0.4352	0.0948
K-27	Poli		0.2586	0.3276	0.4138	0.0463	0.1079	0.1383	0.0852	0.1291	0.1281	0.1281	0.0732	0.0928	0.1112	0.1677	0.2301	0.3615	0.2395	0.0926	0.2948	0.2020	0.2630	0.1623	0.0650
K-28	Tenaga Profesional Lulusan RI		0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.1113	0.1103	0.1103	0.0810	0.1023	0.1000	0.1457	0.0910	0.1653	0.2852	0.2407	0.3333	0.2407	0.0573	0.2888	0.2362	0.3657	0.1296	0.0940
K-29	Deputi Kemendik Poltekhan		0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.1563	0.1074	0.1074	0.0903	0.0730	0.0933	0.1231	0.0769	0.0975	0.2704	0.2361	0.3433	0.1502	0.0756	0.2635	0.3036	0.4402	0.1017	0.0338
K-30	Dosen Hutan		0.2586	0.3276	0.4138	0.0463	0.1642	0.1026	0.100	0.0954	0.0954	0.0620	0.1033	0.1212	0.2593	0.2366	0.3794	0.1327	0.0756	0.2395	0.2355	0.3613	0.1671	0.0326	
K-31	PMG		0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.1095	0.1095	0.1095	0.0937	0.1088	0.1439	0.1067	0.1061	0.1061	0.1862	0.2407	0.3333	0.2407	0.0573	0.2888	0.2362	0.3657	0.1296	0.0940
K-32	Kepala Btu Urung DEW		0.2586	0.4138	0.3276	0.0463	0.0528	0.1754	0.1754	0.0671	0.0671	0.0671	0.1436	0.2297	0.1678	0.3333	0.1852	0.2407	0.2407	0.0573	0.2500	0.2500	0.2500	0.2890	0.0000
K-33	Sul Mli Kemendik PPR		0.3276	0.4138	0.2586	0.0463	0.1018	0.1018	0.1018	0.1153	0.1153	0.1153	0.108	0.1433	0.0898	0.2395	0.2395	0.3670	0.1677	0.0326	0.2680	0.2362	0.3657	0.1296	0.0940
K-34	Alumni 52 Karahanan Energi Mitan		0.0794	0.3605	0.1990	0.0794	0.0519	0.1990	0.0902	0.1008	0.0972	0.0972	0.1418	0.1852	0.2358	0.2030	0.0398	0.3673	0.3893	0.0897	0.2395	0.1677	0.2355	0.3670	0.0326
K-35	TM Widyaisya Dikendok Pustakalayan Kemhan		0.1767	0.7129	0.1944	0.0465	0.0567	0.3521	0.1418	0.0677	0.0423	0.1082	0.0405	0.1648	0.0255	0.5670	0.1603	0.1403	0.1303	0.0346	0.5575	0.1822	0.1885	0.0894	0.0871
K-36	Deputi Perencanaan, SKK Migas		0.1429	0.5719	0.2857	0.0000	0.1800	0.1625	0.2080	0.0616	0.0386	0.0968	0.0316	0.1290	0.0623	0.1176	0.0521	0.3673	0.4430	0.0696	0.2793	0.1741	0.2457	0.3883	0.0690
K-37	Regener		0.3276	0.4138	0.2586	0.0463	0.1056	0.1056	0.1056	0.1079	0.1079	0.1173	0.1079	0.1363	0.0952	0.2467	0.2062	0.3401	0.1900	0.0686	0.2690	0.2362	0.3657	0.1296	0.0940
K-38	Profesional		0.2586	0.3276	0.4138	0.0463	0.0911	0.1027	0.1297	0.0748	0.0744	0.0744	0.1688	0.1676	0.1917	0.2457	0.2062	0.3481	0.1960	0.0686	0.2148	0.2086	0.2081	0.2885	0.0817

Kode Responden	Profil/Instansi	Goal	Level 4 Aliran																											
			Energy Equity																											
			Pemisahan Energi					Akses Ke Lini					Harga Lini					Harga BSM					Intensitas Energi Final							
			Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Pjpt	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Pjpt	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Pjpt	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Pjpt	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Pjpt	CR			
K-21	Pegawai Regenerasi/Diplomas		0.2953	0.1980	0.1980	0.3097	0.0336	0.782	0.2156	0.1885	0.4937	0.0727	0.852	0.1275	0.5064	0.2065	0.0634	0.823	0.1672	0.3676	0.2625	0.0894	0.0477	0.2263	0.5405	0.889	0.0943			
K-22	Executive Director		0.0951	0.0578	0.5341	0.2633	0.6675	0.2296	0.1470	0.5006	0.0429	0.8819	0.1279	0.9853	0.6577	0.1485	0.0933	0.1179	0.1707	0.5769	0.1347	0.0709	0.2332	0.1702	0.5301	0.6535	0.0816			
K-23	Pengusaha		0.2785	0.1361	0.3304	0.1530	0.0451	0.2475	0.7847	0.4381	0.136	0.8807	0.2887	0.7540	0.4822	0.0371	0.0350	0.3663	0.2259	0.3036	0.8395	0.0636	0.2464	0.8363	0.3343	0.3330	0.0873			
K-24	Rektor Universitas Srah Kuala		0.2386	0.2070	0.3076	0.2526	0.0889	0.2844	0.2044	0.3267	0.8944	0.0796	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.0000	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.0000	0.2526	0.2386	0.3039	0.2070	0.0998			
K-25	Perwakilan Daerah Fakultas kefarmasian nasional/Unhan		0.2635	0.2036	0.4012	0.1317	0.0838	0.2844	0.2044	0.3267	0.8944	0.0796	0.2844	0.2044	0.3267	0.8944	0.0796	0.2737	0.2032	0.3789	0.1442	0.0773	0.2496	0.2360	0.3789	0.1224	0.0900			
K-26	Debitur Industri Migas		0.1379	0.3403	0.2403	0.2414	0.0570	0.3933	0.2549	0.4667	0.3451	0.0926	0.5563	0.1360	0.1299	0.1737	0.0671	0.4069	0.0640	0.3003	0.2319	0.0675	0.1652	0.8659	0.5437	0.1432	0.0378			
K-27	Poli		0.3267	0.8944	0.2844	0.2044	0.0796	0.4349	0.1312	0.2360	0.1978	0.8912	0.2635	0.2036	0.4012	0.1317	0.0838	0.2844	0.2032	0.3790	0.1442	0.0692	0.2457	0.2062	0.3481	0.1980	0.0886			
K-28	Tempa Profesional Lethanar RI		0.2635	0.2036	0.4012	0.1317	0.0838	0.2844	0.2036	0.4012	0.1317	0.0838	0.2844	0.2044	0.3267	0.8944	0.0796	0.2704	0.2361	0.3433	0.1902	0.0789	0.2496	0.2360	0.3789	0.1224	0.0900			
K-29	Deputi 7 Kemendik Polukam		0.2635	0.2036	0.4012	0.1317	0.0838	0.2844	0.2044	0.3267	0.8944	0.0796	0.2844	0.2044	0.3267	0.8944	0.0796	0.2844	0.2044	0.3267	0.8944	0.0796	0.2581	0.1984	0.3769	0.1276	0.0916			
K-30	Dosen/Italia		0.2635	0.2036	0.4012	0.1317	0.0838	0.2835	0.2036	0.4012	0.1317	0.0838	0.2844	0.2044	0.3267	0.8944	0.0796	0.2816	0.2432	0.3205	0.1945	0.0436	0.2345	0.2362	0.3528	0.1865	0.0374			
K-31	PHG		0.2666	0.2362	0.3657	0.1295	0.0943	0.2835	0.2036	0.4012	0.1317	0.0838	0.2844	0.2044	0.3267	0.8944	0.0796	0.1885	0.2396	0.4089	0.823	0.0695	0.2496	0.2360	0.3789	0.1224	0.0900			
K-32	Kesata Bio Unsur DSI		0.1245	0.0655	0.7224	0.0876	0.0481	0.0633	0.0833	0.7593	0.0633	0.0000	0.5213	0.8623	0.3817	0.0347	0.8875	0.4313	0.0291	0.3683	0.0336	0.0296	0.1238	0.1949	0.5676	0.1136	0.0365			
K-33	Stal Abi Kamado PPK		0.2635	0.2036	0.4012	0.1317	0.0838	0.2365	0.2365	0.3613	0.1677	0.0926	0.2844	0.2044	0.3267	0.8944	0.0796	0.2737	0.2032	0.3789	0.1442	0.0773	0.2345	0.2362	0.3528	0.1865	0.0374			
K-34	Alumni S2 Manajemen Energi Unhan		0.2066	0.0382	0.4989	0.2961	0.0789	0.0267	0.2861	0.4184	0.2381	0.0676	0.6295	0.0323	0.1994	0.7502	0.0949	0.3523	0.0989	0.2767	0.3775	0.0905	0.1338	0.5966	0.2177	0.0529	0.0356			
K-35	TiB dan Ibtis Bimbingan Puncak/Unhan/Kesata		0.2503	0.1712	0.4890	0.0895	0.0805	0.2724	0.1175	0.5907	0.0594	0.0746	0.5711	0.0521	0.2985	0.0863	0.0468	0.5579	0.0790	0.2588	0.1123	0.0368	0.8959	0.2882	0.2448	0.0803	0.0644			
K-36	Deputi Perencanaan SKK Migas		0.1791	0.1030	0.4896	0.2342	0.0789	0.2946	0.1885	0.4496	0.1473	0.8831	0.3279	0.8937	0.4300	0.1484	0.0265	0.5425	0.0627	0.3481	0.0048	0.0075	0.3094	0.0964	0.5245	0.0600	0.0173			
K-37	Pegawai		0.2635	0.2036	0.4012	0.1317	0.0838	0.2365	0.2073	0.3892	0.1782	0.0902	0.2844	0.2044	0.3267	0.8944	0.0796	0.2635	0.2036	0.4012	0.1317	0.0838	0.2496	0.2360	0.3789	0.1224	0.0900			
K-38	Profesional		0.2737	0.2032	0.3789	0.1442	0.0773	0.2727	0.2032	0.3789	0.1442	0.0773	0.2844	0.2044	0.3267	0.8944	0.0796	0.2737	0.2032	0.3789	0.1442	0.0773	0.2353	0.1785	0.3529	0.2353	0.0328			

A	B	C	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV
Kode Responden	Profesi/Jabatan	Goal	Environmental Sustainability										Global Priority				Abmairi Terpilih	Kategori responden		
			Pembangkit Listrik Rendah Karbon					Emisi CO2 per Kapita					Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Migas				
			Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Migas	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Migas	CR								
K-21	Pegawai Negeri Sipil/Diplomat		0.1667	0.3333	0.2451	0.2549	0.0926	0.1913	0.5012	0.1791	0.1664	0.0776	0.1251	0.2629	0.3916	0.2201	Intras	1	iv	
K-22	Executive Director		0.5685	0.1267	0.2396	0.0852	0.0990	0.2271	0.1527	0.5618	0.0386	0.0818	0.2899	0.1060	0.4121	0.1921	Intras	1	ii	
K-23	Pengusaha		0.4552	0.1685	0.2560	0.1323	0.0687	0.3672	0.1295	0.2776	0.2317	0.0770	0.3021	0.1662	0.3707	0.1610	Intras	1	i	
K-24	Rektor Universitas Syiah Kuala		0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.0000	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.0000	0.2522	0.2380	0.2875	0.2282	Intras	1	vi	
K-25	Penyusun Doktoral fakultas keamanan nasional Unhan		0.2704	0.2361	0.3433	0.1502	0.0799	0.2363	0.2073	0.3802	0.1762	0.0902	0.2542	0.2754	0.3736	0.1566	Intras	1	vi	
K-26	Direktur Infrastruktur Migas		0.2061	0.2866	0.2866	0.2148	0.0917	0.3284	0.1892	0.3875	0.0848	0.0732	0.2978	0.1810	0.2377	0.2635	Reg	1	i	
K-27	Politik		0.2457	0.2082	0.3481	0.1980	0.0686	0.3450	0.2396	0.2748	0.1406	0.0685	0.2929	0.2006	0.3287	0.1778	Intras	1	iv	
K-28	Tenaga Profesional Lemhannas RI		0.2422	0.2422	0.3460	0.1696	0.0450	0.2363	0.2073	0.3802	0.1762	0.0902	0.2513	0.2243	0.3657	0.1587	Intras	1	vi	
K-29	Deputi 7 Kemendikbud		0.2593	0.2366	0.3704	0.1337	0.0798	0.2844	0.2044	0.3267	0.1844	0.0798	0.2754	0.2106	0.3627	0.1513	Intras	1	iv	
K-30	Dosen/Asisten		0.2243	0.2399	0.3988	0.1371	0.0691	0.2355	0.2355	0.3613	0.1677	0.0926	0.2585	0.2268	0.3678	0.1470	Intras	1	vi	
K-31	PNS		0.2422	0.2422	0.3460	0.1696	0.0450	0.2844	0.2044	0.3267	0.1844	0.0798	0.2460	0.2276	0.3640	0.1624	Intras	1	i	
K-32	Kepala Biro Umum DEN		0.3312	0.0369	0.5795	0.0524	0.0836	0.4635	0.1486	0.2897	0.0982	0.0909	0.2997	0.1180	0.4640	0.0983	Intras	1	i	
K-33	Staf Ahli Kemendikbud		0.2593	0.2366	0.3704	0.1337	0.0798	0.2457	0.2082	0.3481	0.1960	0.0686	0.2628	0.2228	0.3630	0.1514	Intras	1	i	
K-34	Alumni S2 Ketahanan Energi Unhan		0.4624	0.1503	0.2370	0.1503	0.0946	0.2990	0.3295	0.3295	0.0499	0.0703	0.3409	0.1966	0.2707	0.1899	Reg	1	v	
K-35	TNIW Arjaldya Bidmedico Pusinfotranhan Kemhan		0.3307	0.1791	0.3996	0.0907	0.0812	0.5209	0.1277	0.2864	0.0651	0.0964	0.4482	0.1643	0.2962	0.0913	Reg	1	iv	
K-36	Deputi Perencanaan, SKK Migas		0.5643	0.0779	0.3000	0.0579	0.0666	0.3941	0.0844	0.4634	0.0680	0.0922	0.2336	0.0928	0.3957	0.2179	Intras	1	i	
K-37	Pegawai		0.5152	0.1194	0.2155	0.1499	0.0710	0.2363	0.2073	0.3802	0.1762	0.0902	0.2919	0.2004	0.3525	0.1552	Intras	1	i	
K-38	Profesional		0.3096	0.2526	0.2070	0.2386	0.0688	0.2457	0.2082	0.3481	0.1960	0.0686	0.2605	0.2177	0.3199	0.2019	Intras	1	v	

A	B	C	Level 1 Kriteria										Level 2 Sub Kriteria 1										Level 2 Sub Kriteria 2									
			Non-Harmonik		CR	Non-Harmonik			CR	Harmonik			CR	ES			Energy Security			CR	Energy Equity				CR							
			Non-Harmonik	Harmonik		Energy Security	Energy Equity	Environmental Sustainability		Energy Security	Energy Equity	Environmental Sustainability		Energy Security	Energy Equity	Environmental Sustainability	Ketahanan Energi	Diversifikasi Pembangkit Listrik	Peningkatan Energi		Akses Ke Listrik	Harga Listrik	Harga BBM									
K-39	Konikasi		0.1407	0.2593	0.0216	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.2542	0.3140	0.3318	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000				
K-40	Peleka Pertamina		0.8415	0.1585	0.0629	0.4277	0.4540	0.1183	0.0000	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.4255	0.4230	0.1514	0.0630	0.6475	0.2895	0.0684	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463				
K-41	eky Kepala EP11 Mager 2017-2021		0.1772	0.2228	0.0942	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.2586	0.3276	0.4138	0.0463	0.3167	0.3321	0.3513	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.3276	0.4138	0.2586	0.0463	0.3276	0.4138	0.2586	0.0463				
K-42	Deputi Keuangan & Manajemen SHAFEGAS		0.8515	0.1481	0.0773	0.3478	0.3905	0.2675	0.0000	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.3575	0.3711	0.2713	0.3276	0.4138	0.2586	0.0463	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463				
K-43	Deputi Operasi		0.7879	0.2121	0.0832	0.3340	0.3102	0.3520	0.0000	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.3515	0.3016	0.3460	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463				
K-44	Statistik PI		0.1687	0.2313	0.0745	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.7111	0.4444	0.4444	0.0000	0.4138	0.3276	0.2586	0.0463	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463				
K-45	Senior Advisor		0.0468	0.1532	0.0875	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.3457	0.3218	0.3325	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.2586	0.3276	0.4138	0.0463	0.2586	0.3276	0.4138	0.0463				
K-46	Lecturer		0.5249	0.4751	0.0748	0.2267	0.0795	0.6948	0.0000	0.1678	0.0747	0.1575	0.0076	0.1907	0.0767	0.7246	0.0642	0.7389	0.1959	0.0627	0.7009	0.2286	0.0725	0.0669	0.7009	0.2286	0.0725	0.0669				
K-47	Teranga Mill Utama Kantor Staf Presiden		0.8360	0.1640	0.0557	0.2972	0.4329	0.2793	0.0000	0.2586	0.3276	0.4138	0.0463	0.2909	0.4077	0.3014	0.2586	0.3276	0.4138	0.0463	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000				
K-48	Senior energy analyst		0.5337	0.4663	0.0741	0.5738	0.3559	0.0701	0.0000	0.5550	0.3885	0.0784	0.0754	0.5851	0.3609	0.0740	0.0609	0.7051	0.2339	0.0629	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463				
K-49	Koordinator Nasional		0.6544	0.3456	0.0871	0.3623	0.1645	0.4731	0.0000	0.3101	0.1938	0.4961	0.0463	0.3443	0.1746	0.4811	0.1938	0.4961	0.3101	0.0463	0.4561	0.1938	0.3101	0.0463	0.4561	0.1938	0.3101	0.0463				
K-50	Kadir Kebijakan Publik Aceh		0.8844	0.1156	0.0880	0.3175	0.3042	0.3183	0.0000	0.2586	0.3276	0.4138	0.0463	0.3036	0.3069	0.3294	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.3276	0.4138	0.2586	0.0463	0.3276	0.4138	0.2586	0.0463				
K-51	TRAC		0.8816	0.1184	0.0727	0.3580	0.3215	0.3221	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3520	0.3235	0.3236	0.3276	0.4138	0.2586	0.0463	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000				
K-52	TRAC		0.8770	0.1230	0.0759	0.3718	0.3144	0.3108	0.0000	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.3770	0.3076	0.3195	0.2586	0.3276	0.4138	0.0463	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463				
K-53	TRAC		0.6857	0.3143	0.0776	0.6738	0.1102	0.2150	0.0000	0.2586	0.3276	0.4138	0.0463	0.5433	0.1732	0.2775	0.0882	0.5710	0.3328	0.0213	0.5874	0.2308	0.1818	0.0464	0.5874	0.2308	0.1818	0.0464				
K-54	Deputi Prinsip dan Kebijakan MHS		0.6384	0.3616	0.0822	0.3369	0.3155	0.3492	0.0000	0.4138	0.2586	0.3276	0.0463	0.3492	0.3050	0.3457	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3276	0.4138	0.2586	0.0463	0.3276	0.4138	0.2586	0.0463				
K-55	Puk		0.7705	0.2295	0.0661	0.3748	0.3125	0.3127	0.0000	0.4138	0.3276	0.2586	0.0463	0.3837	0.3180	0.3003	0.4138	0.3276	0.2586	0.0463	0.3276	0.2586	0.4138	0.0463	0.3276	0.2586	0.4138	0.0463				
K-56	Puk		0.7375	0.2625	0.0852	0.2425	0.5375	0.2200	0.0000	0.2146	0.6379	0.1474	0.0937	0.2352	0.5638	0.2010	0.1938	0.3101	0.4361	0.0463	0.5622	0.0863	0.3514	0.0463	0.5622	0.0863	0.3514	0.0463				
K-57	TRAC		0.1711	0.2829	0.0828	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000				
K-58	Teranga Profesional Lulusan RI		0.5714	0.4286	0.0000	0.8173	0.0771	0.1056	0.0000	0.6182	0.0909	0.0909	0.0000	0.6177	0.0630	0.0990	0.0526	0.4737	0.4737	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000				
K-59	TRAC		0.7382	0.2618	0.0871	0.4069	0.2593	0.3333	0.0000	0.5401	0.1830	0.2980	0.0073	0.4418	0.2346	0.3236	0.1938	0.3101	0.4361	0.0463	0.4361	0.3101	0.1938	0.0463	0.4361	0.3101	0.1938	0.0463				
K-60	Kontribusi, Pemasokan		0.1983	0.2117	0.0823	0.5320	0.2082	0.2598	0.0000	0.3379	0.1372	0.5170	0.0463	0.4838	0.1932	0.3172	0.1429	0.4288	0.4288	0.0000	0.8000	0.2000	0.2000	0.0000	0.8000	0.2000	0.2000	0.0000				

Kode Responden	Profil/Abstrak	Goal	Level 3 Sub Keters. 2											Energy Security											
			Environmental Sustainability				TF							Energy Security											
			Intensitas Energi Final	Pembangkit Listrik Rendah Karbon	Emisi CO ₂ per Kapita	CR	Ketahanan Energi	Diversifikasi Pembangkit Listrik	Perencanaan Energi	Akses Ke Listrik	Harga Listrik	Harga DBF	Intensitas Energi Final	Pembangkit Listrik Rendah Karbon	Emisi CO ₂ per Kapita	Ketahanan Energi				Diversifikasi Pembangkit Listrik					
																Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Konstruksi	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Konstruksi	CR
K-33	Komisar	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.781	0.781	0.781	0.947	0.947	0.947	0.700	0.700	0.700	0.2363	0.2073	0.3800	0.1962	0.0662	0.2686	0.2362	0.3937	0.1295	0.0940	
K-40	Petaja Perantara	0.784	0.7129	0.7187	0.0485	0.0266	0.2795	0.1232	0.1751	0.3294	0.3386	0.0787	0.9380	0.0288	0.4677	0.3773	0.878	0.0534	0.0590	0.2437	0.3765	0.3768	0.0627	0.0641	
K-41	Wf Kepala BPH Pjpt 2017-2021	0.4136	0.2586	0.3276	0.0463	0.1340	0.0089	0.8037	0.9089	0.1374	0.0659	0.9454	0.0989	0.161	0.3467	0.2062	0.3491	0.980	0.0688	0.3457	0.2082	0.3481	0.990	0.0686	
K-42	Deputi Keunggulan & Inovasi SKKHDAS	0.3276	0.4136	0.2586	0.0463	0.1071	0.1486	0.0925	0.638	0.0960	0.1276	0.0989	0.921	0.0702	0.3267	0.1844	0.2844	0.2044	0.0798	0.2945	0.1966	0.2362	0.3528	0.0974	
K-43	Deputi Operasi	0.2586	0.3276	0.4136	0.0463	0.9053	0.0909	0.782	0.1048	0.0790	0.0966	0.0937	0.936	0.1435	0.2526	0.2388	0.3081	0.2070	0.0688	0.3862	0.988	0.3044	0.9429	0.0898	
K-44	Struktur IT	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.0370	0.1481	0.901	0.1079	0.9392	0.0662	0.1111	0.1111	0.111	0.2772	0.4884	0.0637	0.1028	0.0886	0.6341	0.2375	0.0480	0.0636	0.0791	
K-45	Senior Advisor	0.2586	0.3276	0.4136	0.0463	0.9430	0.0894	0.7032	0.0832	0.9394	0.1332	0.0860	0.988	0.1376	0.2682	0.4261	0.2036	0.0638	0.0883	0.5576	0.1844	0.0681	0.3995	0.1732	
K-46	Leitur	0.0629	0.3604	0.5767	0.0463	0.2028	0.9478	0.0269	0.0538	0.074	0.0066	0.0488	0.2611	0.4178	0.0407	0.5072	0.3709	0.0703	0.0812	0.0758	0.0920	0.0833	0.2528	0.0895	
K-47	Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.0752	0.0853	0.1004	0.1093	0.1093	0.1093	0.989	0.989	0.989	0.2305	0.1677	0.2365	0.3613	0.0926	0.2395	0.1677	0.2305	0.3613	0.0926	
K-48	Senior energy analyst	0.916	0.8954	0.2237	0.0618	0.0344	0.3995	0.1322	0.9430	0.0933	0.1862	0.0725	0.0493	0.0195	0.9171	0.0413	0.6577	0.1339	0.0660	0.3320	0.1623	0.2940	0.3910	0.0692	
K-49	Koordinator Nasional	0.5310	0.1372	0.3518	0.0485	0.0667	0.7108	0.3067	0.0866	0.0338	0.0542	0.2994	0.0660	0.9397	0.5733	0.1367	0.0902	0.2558	0.0736	0.3263	0.988	0.1128	0.1794	0.0261	
K-50	Ketika Kebijakan Publik Aceh	0.3276	0.4136	0.2586	0.0463	0.888	0.0941	0.782	0.988	0.1270	0.0794	0.979	0.1063	0.0882	0.2737	0.2032	0.3789	0.942	0.0773	0.2944	0.2044	0.3307	0.8944	0.0798	
K-51	TNAD	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.156	0.1468	0.0919	0.679	0.978	0.878	0.679	0.979	0.979	0.879	0.266	0.4349	0.132	0.0912	0.2945	0.2362	0.3529	0.166	0.0974	
K-52	TNAD	0.3276	0.4136	0.2586	0.0463	0.0975	0.1238	0.0660	0.1271	0.0798	0.939	0.833	0.106	0.0936	0.887	0.2388	0.4386	0.988	0.0782	0.2944	0.2044	0.3267	0.944	0.0798	
K-53	TNAD	0.4136	0.2586	0.3276	0.0463	0.0923	0.3762	0.9388	0.953	0.0474	0.0326	0.1940	0.0778	0.0909	0.2526	0.2388	0.3081	0.2070	0.0688	0.2251	0.1645	0.4502	0.802	0.0910	
K-54	Direktor Polhutan Kadisub Wilayah I	0.2586	0.3276	0.4136	0.0463	0.164	0.164	0.988	0.1262	0.0789	0.0994	0.933	0.9421	0.3481	0.2457	0.2002	0.980	0.0686	0.1980	0.3067	0.2953	0.980	0.0936		
K-55	Pol	0.2586	0.4136	0.3276	0.0463	0.888	0.1257	0.0882	0.9026	0.0811	0.1097	0.0777	0.1245	0.0884	0.1371	0.3427	0.2025	0.378	0.0694	0.1667	0.3035	0.2406	0.2345	0.0893	
K-56	Pol	0.1938	0.4361	0.3701	0.0463	0.0456	0.0729	0.787	0.109	0.0487	0.1801	0.0305	0.0897	0.0623	0.088	0.5654	0.102	0.796	0.0879	0.0630	0.5281	0.1894	0.2976	0.0258	
K-57	TNAD	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.1111	0.1111	0.111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.111	0.1317	0.4012	0.2036	0.2636	0.0988	0.2929	0.3470	0.2464	0.2029	0.0225	
K-58	Tenaga Profesional Lulusan B	0.3333	0.3333	0.3333	0.0000	0.0430	0.3679	0.3679	0.0277	0.0277	0.0277	0.0301	0.0301	0.0301	0.6786	0.9894	0.0954	0.0584	0.0688	0.4900	0.4900	0.0900	0.0500	0.0000	
K-59	TNAD	0.4961	0.3761	0.7038	0.0463	0.0856	0.1376	0.2132	0.1894	0.0727	0.0485	0.866	0.9002	0.0627	0.896	0.2422	0.3460	0.2422	0.0450	0.2949	0.2451	0.3333	0.997	0.0508	
K-60	Konsultan, Pemasaran	0.2500	0.5000	0.2500	0.0000	0.0699	0.2288	0.2098	0.1659	0.0396	0.0793	0.058	0.0793	0.0366	0.0366	0.2760	0.1361	0.6800	0.0976	0.0917	0.1651	0.3716	0.3716	0.0563	

Kode Responden	Profil Jabatan	Goal	Level 4 Alternatif																								
			Perencanaan Energi					Akses Ke Listrik					Harga Listrik					Harga DBF					Integrasi Energi Final				
			Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrol Mgr	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrol Mgr	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrol Mgr	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrol Mgr	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrol Mgr	CR
K-33	Konstruksi		0.1665	0.2396	0.4093	0.1623	0.0695	0.2363	0.2073	0.3902	0.1762	0.0902	0.2044	0.2044	0.3267	0.1944	0.0798	0.2746	0.2396	0.3450	0.1406	0.0685	0.2496	0.2360	0.3398	0.1224	0.0900
K-40	Pakada Peranans		0.4478	0.3320	0.1880	0.0543	0.0913	0.5776	0.1227	0.2963	0.0434	0.0984	0.5631	0.1285	0.2703	0.0377	0.0955	0.5228	0.0972	0.0770	0.3330	0.0917	0.4619	0.1201	0.3778	0.0401	0.0390
K-41	aka Kepala BPH Mgrat 2017-2021		0.2243	0.2399	0.3368	0.1371	0.0691	0.2635	0.2038	0.4402	0.1017	0.0938	0.2844	0.2044	0.3267	0.1944	0.0798	0.3198	0.1942	0.3510	0.1433	0.0794	0.2991	0.1964	0.3760	0.1270	0.0760
K-42	Deputi Keuangan & Monetisasi SKKMDAS		0.1760	0.2944	0.1480	0.4448	0.0532	0.3067	0.2851	0.1660	0.1980	0.0936	0.4531	0.2773	0.1613	0.1763	0.0773	0.5822	0.0932	0.1612	0.1734	0.0029	0.3076	0.2366	0.2070	0.2526	0.0688
K-43	Deputi Operasi		0.2327	0.2445	0.3794	0.1604	0.0532	0.1023	0.2362	0.4377	0.1409	0.0993	0.2844	0.2044	0.3267	0.1944	0.0798	0.2497	0.2002	0.3481	0.1980	0.0686	0.2496	0.2360	0.3398	0.1224	0.0900
K-44	Staf ahli PI		0.3948	0.4537	0.0425	0.1780	0.0559	0.5124	0.3727	0.0464	0.1285	0.0902	0.3173	0.4677	0.0534	0.1616	0.0990	0.3635	0.4433	0.0497	0.1429	0.0204	0.4405	0.3248	0.0914	0.1623	0.0323
K-45	Senior Advisor		0.2254	0.2897	0.3523	0.1997	0.0774	0.3307	0.1791	0.3399	0.0907	0.0670	0.2947	0.1221	0.4982	0.0850	0.0901	0.2486	0.0728	0.5020	0.1796	0.0073	0.1929	0.0752	0.5823	0.2066	0.0876
K-46	Lecturer		0.0805	0.5210	0.0751	0.3434	0.0871	0.0682	0.6974	0.0820	0.1744	0.0903	0.0826	0.6948	0.0647	0.1993	0.0679	0.0838	0.6780	0.0937	0.2377	0.0645	0.0674	0.6407	0.0647	0.2292	0.0971
K-47	Manajemen Utama Kantor Staf Presiden		0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.0000	0.3680	0.1537	0.2894	0.1979	0.0796	0.2044	0.1844	0.2944	0.3267	0.0798	0.3683	0.1601	0.2635	0.1496	0.0301	0.3178	0.2025	0.3421	0.1371	0.0894
K-48	Sensor energy analitik		0.0982	0.0737	0.5932	0.2350	0.0321	0.4349	0.0651	0.4349	0.0651	0.0909	0.4915	0.0397	0.3556	0.1102	0.0980	0.5130	0.0414	0.3303	0.0953	0.0794	0.5637	0.2502	0.1427	0.0434	0.0924
K-49	Koordinator Nasional		0.5163	0.1565	0.0079	0.2394	0.0904	0.4497	0.1963	0.0932	0.2719	0.0782	0.4243	0.1310	0.1189	0.2650	0.0969	0.4368	0.2166	0.0956	0.2911	0.0466	0.4786	0.1690	0.1012	0.2504	0.0762
K-50	Kepu Kestabilan Publik Asasi		0.2363	0.2073	0.3902	0.1782	0.0902	0.1965	0.2432	0.2616	0.1795	0.0440	0.2948	0.2020	0.3510	0.1623	0.0692	0.2748	0.2396	0.3450	0.1406	0.0685	0.2991	0.1964	0.3768	0.1270	0.0760
K-51	TRAD		0.2483	0.2463	0.2995	0.2090	0.0225	0.2363	0.2073	0.3902	0.1762	0.0902	0.2844	0.2044	0.3267	0.1944	0.0798	0.2457	0.2092	0.3481	0.1980	0.0686	0.2496	0.2360	0.3398	0.1224	0.0900
K-52	TRAD		0.2844	0.2044	0.3267	0.1944	0.0798	0.2327	0.2445	0.3794	0.1604	0.0532	0.2737	0.2032	0.3789	0.1442	0.0773	0.2466	0.2361	0.3063	0.1631	0.0604	0.1995	0.2432	0.3099	0.1795	0.0440
K-53	TRAD		0.3176	0.2025	0.3427	0.1371	0.0694	0.2363	0.2073	0.3902	0.1762	0.0902	0.9005	0.1206	0.2395	0.1634	0.0223	0.1628	0.1672	0.3676	0.2625	0.0684	0.4317	0.1499	0.1823	0.2382	0.0995
K-54	Distrik Pulu, an KasFOGub Wlhanil		0.3380	0.2042	0.2887	0.1830	0.0225	0.3481	0.2457	0.2092	0.1980	0.0688	0.3033	0.2943	0.2406	0.1957	0.0889	0.2900	0.2900	0.2900	0.2900	0.0000	0.3311	0.1722	0.2394	0.2853	0.0695
K-55	Pulu		0.1317	0.4070	0.2036	0.2635	0.0936	0.1762	0.3902	0.2073	0.2363	0.0902	0.1317	0.4070	0.2036	0.2635	0.0936	0.1762	0.3902	0.2073	0.2363	0.0902	0.1644	0.3267	0.2044	0.2844	0.0798
K-56	Pulu		0.2485	0.9904	0.0663	0.1349	0.0685	0.2875	0.5410	0.0690	0.1226	0.0951	0.1234	0.5334	0.1601	0.1030	0.0129	0.4396	0.3243	0.0932	0.1788	0.0680	0.2992	0.3876	0.1072	0.2060	0.0902
K-57	TRAD		0.1317	0.4070	0.2036	0.2635	0.0936	0.1942	0.3789	0.2032	0.2737	0.0773	0.1762	0.3902	0.2073	0.2363	0.0902	0.1604	0.3794	0.2445	0.2327	0.0632	0.1337	0.3704	0.2386	0.2993	0.0798
K-58	Manajemen Profesional Lantahanat RI		0.6416	0.1794	0.1755	0.0634	0.0902	0.1049	0.1266	0.0919	0.0788	0.0795	0.6689	0.1085	0.0992	0.0966	0.0388	0.6688	0.1085	0.0992	0.0966	0.0388	0.6686	0.1395	0.0992	0.0966	0.0386
K-59	TRAD		0.2365	0.1677	0.3610	0.2355	0.0908	0.4980	0.1999	0.1695	0.2725	0.0284	0.3934	0.1600	0.2785	0.1361	0.0451	0.3480	0.1696	0.2422	0.2422	0.0450	0.2992	0.1524	0.1909	0.4177	0.0798
K-60	Kontribusi Pemasokan an		0.2793	0.0986	0.1361	0.4690	0.0915	0.1712	0.0995	0.2903	0.4890	0.0995	0.2094	0.0907	0.2064	0.4864	0.0576	0.1694	0.0794	0.2780	0.4942	0.0686	0.1694	0.0794	0.2780	0.4942	0.0686

A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL
Kode Responden	Profesi/Jabatan	Goal	Environmental Sustainability										Global Priority				Alternatif Terpilih	kategori responden	
			Pembangkit Listrik Rendah Karbon				CR	Emisi CO2 per Kapita				CR							
			Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Migas		Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Migas								
			Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Migas	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Migas	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Migas			
K-39	Komisaris		0.5568	0.1392	0.2076	0.0964	0.0919	0.2457	0.2082	0.3481	0.1980	0.0686	0.2815	0.2134	0.3513	0.1539	Infras	1	ii
K-40	Pekerja Pertamina		0.2129	0.1938	0.5536	0.0397	0.0961	0.4476	0.1514	0.3664	0.0347	0.0959	0.4126	0.2251	0.2731	0.0891	Reg	1	iii
K-41	eks Kepala BPH Migas 2017-2021		0.6524	0.1143	0.1461	0.0872	0.0807	0.4011	0.1711	0.3342	0.0936	0.0994	0.3190	0.1947	0.3407	0.1456	Infras	1	i
K-42	Deputi Keuangan & Monetisasi SKKMIGAS		0.2373	0.3863	0.3030	0.0733	0.0614	0.5173	0.2559	0.1367	0.0902	0.0738	0.3439	0.2307	0.2086	0.2168	Reg	1	i
K-43	Deputi Operasi		0.4933	0.1860	0.1552	0.1655	0.0170	0.2363	0.2073	0.3802	0.1762	0.0902	0.2802	0.2157	0.3359	0.1681	Infras	1	i
K-44	Staf ahli PI		0.2386	0.3018	0.2070	0.2526	0.0688	0.4439	0.4074	0.0395	0.1092	0.0916	0.4227	0.3678	0.0649	0.1446	Reg	1	ii
K-45	Senior Advisor		0.6333	0.0479	0.2529	0.0660	0.0809	0.1393	0.5901	0.2127	0.0578	0.0960	0.3107	0.2383	0.3370	0.1139	Infras	1	v
K-46	Lecturer		0.0778	0.6002	0.1405	0.1815	0.0956	0.0636	0.6190	0.0597	0.2377	0.0845	0.0778	0.6100	0.0891	0.2230	SDM	1	vi
K-47	Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden		0.3859	0.2026	0.1672	0.2444	0.0687	0.3676	0.1672	0.2825	0.1828	0.0894	0.3046	0.1891	0.2662	0.2400	Reg	1	i
K-48	Senior energy analyst		0.2372	0.0588	0.3781	0.3259	0.0683	0.6094	0.1267	0.2228	0.0412	0.0931	0.2977	0.1049	0.3713	0.2261	Infras	1	i
K-49	Koordinator Nasional		0.2082	0.1980	0.2457	0.3481	0.0686	0.5121	0.1946	0.0917	0.2016	0.0444	0.4731	0.1802	0.1072	0.2395	Reg	1	v
K-50	Kadiv Kebijakan Publik Aceh		0.5333	0.1778	0.1333	0.1556	0.0441	0.2686	0.2362	0.3657	0.1295	0.0940	0.3016	0.2092	0.3334	0.1559	Infras	1	v
K-51	TNI AD		0.4854	0.1402	0.2051	0.1693	0.0687	0.2844	0.2044	0.3267	0.1844	0.0798	0.2810	0.2137	0.3424	0.1629	Infras	1	iv
K-52	TNI AD		0.6504	0.1246	0.1309	0.0940	0.0394	0.2363	0.2073	0.3802	0.1762	0.0902	0.2930	0.2094	0.3385	0.1591	Infras	1	iv
K-53	TNI AU		0.4317	0.1499	0.1823	0.2362	0.0955	0.2549	0.2451	0.3333	0.1667	0.0926	0.2957	0.1826	0.3426	0.1790	Infras	1	iv
K-54	Direktur Prshn, ex KasKoGab WilHan II		0.3311	0.2914	0.2053	0.1722	0.0685	0.2748	0.2396	0.3450	0.1406	0.0685	0.3029	0.2524	0.2618	0.1829	Reg	1	iii
K-55	Polri		0.0977	0.3703	0.2538	0.2782	0.0773	0.1623	0.3510	0.2020	0.2848	0.0692	0.1489	0.3609	0.2151	0.2752	SDM	1	iv
K-56	Polri		0.1502	0.2704	0.3433	0.2361	0.0799	0.2300	0.5817	0.0972	0.0911	0.0490	0.2534	0.4689	0.1121	0.1655	SDM	1	iv
K-57	TNI AD		0.1429	0.2857	0.2857	0.2857	0.0000	0.1623	0.3510	0.2020	0.2848	0.0692	0.1529	0.3658	0.2255	0.2558	SDM	1	iv
K-58	Tenaga Profesional Lemhannas RI		0.2549	0.2451	0.3333	0.1667	0.0926	0.6688	0.1355	0.0992	0.0966	0.0386	0.5612	0.2790	0.0939	0.0659	Reg	1	iv
K-59	TNI AD		0.3802	0.2363	0.2073	0.1762	0.0902	0.3924	0.1930	0.2785	0.1361	0.0451	0.3048	0.1871	0.2671	0.2411	Reg	1	iv
K-60	Konsultan, Purnawirawan		0.1494	0.0784	0.2780	0.4942	0.0898	0.1494	0.0784	0.2780	0.4942	0.0898	0.1654	0.1162	0.2520	0.4665	MKM	1	iii

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Kode Responden	Profil/Lababan	Goal	Level1 Kriteria		CR	Level2 Sub Kriteria 1																	IR En	
			Non Hankan	Hankan		Non Hankan				Hankan				TP			Energy Security			Energy Equity				
						Energy Security	Energy Equity	Environmental Sustainability	CR	Energy Security	Energy Equity	Environmental Sustainability	CR	Energy Security	Energy Equity	Environmental Sustainability	Ketegangan n Impor	Diversifikasi Pembangkit Listrik	Penyimpanan Energy	CR	Akses Ke Listrik	Harga Listrik		Harga BBM
Summary																								
Total Responden		Level1 Kriteria	Prioritas Pilihan		60	Level2 Sub Kriteria 1	Non Hankan	60	Level2 Sub Kriteria 1	Hankan	60	Prioritas Pilihan			Level3 Sub Kriteria 2	Energy Security	60	Level3 Sub Kriteria 2	Energy Equity	60				
			1	2								1	2	3										
			Non Hankan	Hankan								Energy Security	Environmental Sustainability	Energy/Equity										
			0.7560	0.2440							0.3642	0.3372	0.2986											

A	B	C	D	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV			
Kode Responden	Profil/Lababan	Goal	Level2 Sub Kriteria 2										Energy Security											
			Environmental Sustainability				CR	TP						Ketegangan Impor				CR	Diversifikasi Pembangkit Listrik				CR	
			Intensitas Energi Final	Pembangkit Listrik Rendah Karbon	Emission CO ₂ per Kapita	Keagungan Impor		Diversifikasi Pembangkit Listrik	Penyimpanan Energy	Akses Ke Listrik	Harga Listrik	Harga BBM	Intensitas Energi Final	Pembangkit Listrik Rendah Karbon	Emission CO ₂ per Kapita	Regulasi	Sumber Daya Manusia		Infrastruktur	Model Konsumen Pagar	Regulasi	Sumber Daya Manusia		Infrastruktur
Summary																								
Total Responden		Level1 Kriteria	Level 3 Sub Kriteria 2	Environmental Sustainability	60	Prioritas Pilihan										Level4 Alternatif	Energy Security	Keagungan Impor	60	Level4 Alternatif	Energy Security	Diversifikasi Pembangkit Listrik	60	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9										
						Diversifikasi Pembangkit Listrik	Penyimpanan Energy	Emission CO ₂ per Kapita	Pembangkit Listrik Rendah Karbon	Intensitas Energi Final	Akses Ke Listrik	Harga Listrik	Keagungan Impor	Harga BBM										
						0.940	0.1235	0.721	0.1125	0.125	0.186	0.088	0.020	0.025										

Kode Responden	Profesi/Jabatan	Goal	Level 4 Alternatif																				
			Energy Equity																				
			Penyediaan Energi				Akses Ke Listrik				Harga Listrik				Harga BBM				Investasi Energi Final				
			Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Mgas	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Mgas	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Mgas	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Mgas	CR	
Simpulan																							
Total Responden	Level 1 Kriteria	Level 4 Alternatif	Energy Security	Penyediaan Energi	60	Level 4 Alternatif	Energy Equity	Akses Ke Listrik	60	Level 4 Alternatif	Energy Equity	Harga Listrik	60	Level 4 Alternatif	Energy Equity	Harga BBM	60	Level 4 Alternatif	Environmental Sustainability	Investasi Energi Final	60		

Kode Responden	Profesi/Jabatan	Goal	Environmental Sustainability										Global Priority				Alternatif Terpilih	Kategori responden				
			Pembangkit Listrik Rendah Karbon					Emisi CO2 per Kapita					Prioritas Pilihan Alternatif									
			Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Mgas	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Mgas	CR										
			Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Mgas	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Mgas	CR	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Mgas						
Simpulan																						
Total Responden	Level 1 Kriteria	Level 4 Alternatif	Environmental Sustainability	Pembangkit Listrik Rendah Karbon	60	Level 4 Alternatif	Environmental Sustainability	Emisi CO2 per Kapita	60	Prioritas Pilihan Alternatif				Alternatif Terpilih Total Responden	Regulasi	Sumber Daya Manusia	Infrastruktur	Model Kontrak Mgas	14	7	37	2
										1	2	3	4		0,2988	0,2854	0,2276	0,1882				
										control	25,85%	28,54%	22,76%		16,82%	23,33%	11,67%	61,67%	3,33%			

Lampiran 5: Substansi wawancara dengan Nara sumber

Pengolahan Data Wawancara dengan Nara Sumber

No	Nara sumber	Substansi Wawancara	Matriks Kategori Penelitian		
			Pertanyaan Penelitian	Elemen Panca gatra	Instrumen Kebijakan Publik
1	NS 1 – Prof. Hikmahanto	Persaingan antara India – RRT dalam konteks jalur Laut Andaman - Aceh Sampai saat ini belum ada isu yang signifikan yang mempengaruhi konstelasi persaingan antara India dan RRT, yang dampaknya sampai ke perbatasan Indonesia di laut Andaman – Aceh	1	P	R
		Dalam konteks Indo Pacific – BRI, konstelasi dan kontanstasi antara RRT dengan aliansi Amerika Serikat belum sampai kepada tahap yang mengganggu keamanan regional.	1	HK	R
		Sesuai UNCLOS 1982, batas kewenangan teritorial suatu negara adalah sampai 12 mil laut dari garis pangkal. Dalam hal ada fasilitas migas Negara sebagai objek vital nasional di atas 12 mil laut, dan apabila ada gangguan keamanan terhadap fasilitas tersebut, yurisdiksi keamanan hukum suatu negara hanya hingga batas 12 mil laut. Perlu diperhatikan protokol pengamanan dan perjanjian antar negara terkait dengan penggunaan aparat militer di luar zona 12 mil laut.	1	HK	R
		Aspek geostrategi laut Andaman – Provinsi Aceh hendaknya dilihat dan dikaitkan dengan ketersediaan energi untuk mendukung strategi pertahanan	1	E	I
2	NS 2 Prof.	“Keistimewaan Aceh”, dalam konteks historis adanya isu	2	HK	R

	Doddy Abdassah	keamanan di Provinsi tersebut pada waktu sebelumnya, seperti terkait dengan Gerakan Aceh Merdeka, dan bagaimana Perusahaan Migas yang beroperasi di Aceh seperti ExxonMobil dalam menangani isu keamanan, hendaknya merupakan pelajaran. Investor domestik terutama investor asing sangat concern dan sensitif terkait dengan isu keamanan. Kemampuan Kontraktor Migas ExxonMobil bersama dengan Pertamina dan Pemerintah untuk memenuhi kontrak pemenuhan LNG kepada pembeli (buyer) Kontrak Jangka Panjang internasional merupakan bagian dari menjaga reputasi bisnis dan reputasi negara.			
		Saat ini dunia sedang mengarah kepada energi bersih. Di Singapore sedang dikembangkan teknologi untuk menangkap karbon dioksida (CO2). Reservoir ex lapangan migas di Arun merupakan tempat injeksi CO2 yang sangat ideal. Hal ini dapat menjadi bisnis yang prospektif dan menjanjikan bagi Provinsi Aceh	1	E	MdK
		Gas hidrat yang ramah lingkungan, karena menghasilkan air, sangat besar potensinya di pinggir basin (cekungan) North Sumatra Offshore. Hal ini merupakan nilai tambah untuk aspek geoeconomis dan geostrategi Aceh, apabila dikembangkan	2	E	MdK
3	NS 3 - Prof Tutuka Ariadji u.p Ir Mustafid Gunawan	Untuk mendorong kegiatan migas di lepas pantai perbatasan Aceh, Pemerintah memberikan berbagai insentif, termasuk model-model kontrak yang lebih menarik bagi Investor, sepanjang diatur dalam kewenangan kementerian ESDM	2	E	MdK
		Dalam hal kewenangan tersebut berada di luar otoritas Kementerian ESDM, maka akan merujuk kepada peraturan	3	E	R

		perundang-undangan yang berlaku dan lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004			
		Dalam hal terjadi pelamparan wilayah kerja migas di dalam batas wilayah 12 mil laut, hingga saat ini belum ada regulasi pengaturan manajemen, apakah kewenangan tersebut ada pada BPMA atau pada SKK Migas. Pengaturan yang ada baru terbatas pada yang terkait dengan bagi hasil migas	3	E	R
4	NS 4 MayJen Purn Dr. M. Nakir	Pada dasarnya belum ada kebijakan khusus pertahanan yang fokus Selat Malaka – Laut Andaman.	1	HK	R
		Konflik akan dihasilkan oleh Negara-negara yang akan mengendalikan sumber energi, perikanan atau sumber daya laut dan bahan mentahnya	1	E	I
		Terdapat tiga pendekatan dalam kebijakan pengelolaan perbatasan, yaitu pendekatan kesejahteraan, pendekatan lingkungan dan pendekatan keamanan	1	E	SDM
		Strategi dan postur pertahanan disesuaikan dengan hakekat <i>perceived</i> ancaman. Perkuatan postur disesuaikan dengan prediksi ancaman, termasuk prioritasnya. Penguatan dapat dilakukan dengan penambahan satuan, atau penguatan satuan, misalnya satu batalyon dari yang normalnya 700 orang menjadi 1.000 orang, atau juga dengan penambahan alutsista seperti artileri medan, dan sebagainya.	1	HK	I
		Menyikapi kebijakan pengelolaan migas dalam perspektif pertahanan negara di wilayah perbatasan Kelembagaan : melalui Instansi-instansi Pemerintah terkait (teknis & program) secara sektoral, Pemerintah daerah, Komite-komite perbatasan	3	HK	SDM

		Dasar hukum, antara lain Undang - Undang nomor 24 tahun 1992 tentang Tata ruang, Undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2002 tentang Lintas damai kapal asing melalui perairan Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2002 tentang lintas damai kapal dan pesawat udara asing melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia), Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan, Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kebijakan, yaitu menjaga keutuhan wilayah negara, menjaga kedaulatan negara, dan percepatan pembangunan di perbatasan			
		Esensi penguatan wilayah perbatasan dalam perspektif pertahanan negara dalam tataran kebijakan, meliputi Sinkronisasi penataan ruang wilayah nasional dan daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan serta kawasan strategis nasional Memperkuat kehadiran TNI di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/ terdepan serta daerah rawan Penguatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pembangunan wilayah pertahanan di darat, di laut & di udara secara berkesinambungan sesuai prioritas Optimalisasi penyelesaian masalah perbatasan negara serta masalah terkait melalui diplomasi secara damai	1	HK	I
5	NS 5 – Laksda TNI TNSB	Ancaman perang di laut Andaman relatif sangat <i>remote</i> , dan <i>unlikely</i> . Militer India memang diperkuat di gugusan kepulauan Andaman – Nicobar, tetapi tujuannya bukan untuk mengancam	1	HK	I

	Hutabarat	Indonesia.			
		Indonesia telah menandatangani perjanjian landas kontinen dengan India, yang meliputi di laut Andaman empat titik koordinat, dan di Samudera Hindia lima titik koordinat. Indonesia juga telah menandatangani persetujuan landas kontinen dengan Thailand. Garis zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang terdapat dalam peta Indonesia, sifatnya adalah klaim sepihak (unilateral claim).	1	E	I
		Sabang di Pulau Weh pernah menjadi pelabuhan besar, yang cocok untuk kapal selam. Namun, saat ini Sabang tidak memiliki infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai untuk penempatan sebagai <i>base Militer</i> , yang dapat menopang banyak orang.	1	HK	I
		Ancaman di laut dari aspek maritim meliputi <i>trans organized crime</i> (TOC), perompakan bersenjata dan pembajakan, pencemaran di laut, kecelakaan di laut, <i>illegal fishing</i> (meliputi illegal, unreported, unregulated fishing), pelanggaran wilayah, terorisme di laut, dan invasi. Dari gradasinya, <i>trans organized crime</i> adalah yang paling berbahaya, <i>illegal fishing</i> yang paling mungkin serta invasi yang kecil kemungkinannya.	1	HK	I
		Kerawanan faktual berupa pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah illegal fishing, manusia perahu (imigrasi ilegal, pencari suaka/ pengungsi atau penyelundupan manusia)	1	HK	I
		Patroli pengamanan laut bersama antara lain ada dalam wadah Patkor Indindo (Indonesia – India), Malacca Straits Sea Patrol, Pengamanan Perbatasan Laut RI – Thailand, serta Operasi Keamanan Laut	1	HK	SDM

6	NS 6 Dr. Sukendra Martha	Kedaulatan suatu bangsa atas sumber daya alam, tercantum dalam piagam Perserikatan Bangsa-bangsa seperti deklarasi dekolonisasi atas jaminan kemerdekaan kepada negara-negara dan bangsa-bangsa, serta resolusi nomor 1803 (XVII) tanggal 14 Desember 1962 mengenai " <i>Permanent sovereignty over natural resources</i> "	1	E	R
		Ketahanan energi, kemandirian energi serta kedaulatan energi terkait dengan prioritas kebijakan, konsistensi akan konsekuensinya serta alokasi dan realokasi sumber daya	1	E	SDM
		Terdapat dua pendekatan gatra dalam ketahanan nasional, yang diperlukan untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan guna mencapai tujuan nasional. Kedua pendekatan ketahanan nasional tersebut adalah : Pendekatan gatra, yang terdiri dari ideologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan Pendekatan spasial geografis yang dipengaruhi oleh ketahanan tiap provinsi atau daerah	1	P	SDM
		Filosofis dalam pengelolaan Sumber daya alam, terdiri atas dua bagian pokok yaitu : Renewable resources (sumber daya alam terbarukan) Pendayagunaannya memerlukan pengelolaan yang tepat sesuai karakteristiknya, yang dapat menjamin kelestarian sumber daya alam bagi kebutuhan generasi kini dan generasi yang akan datang, yang sejauh mungkin mencegah dan mengurangi kerusakan sumber daya alam yang bersangkutan serta lingkungannya Non renewable resources (sumber daya alam tidak terbarukan) Penggunaannya harus dilakukan sehemat dan seefektif mungkin	2	E	SDM

		agar pemanfaatannya dapat berjangka panjang dan eksplorasinya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup/ pencemaran yang merugikan			
7	NS 7 – Pangdam Iskandar Muda	Dalam rangka kesiapan dan kesiapsiagaan operasi di wilayah teritorialnya, Kodam Iskandar Muda selaku kotama operasi melaksanakan pembinaan organisasi, pembinaan personil, pembinaan latihan, pembinaan material, pembinaan piranti lunak, serta pembinaan pangkalan	1	HK	I
		Proyeksi, prediksi dan estimasi potensi ancaman baik dari dalam maupun luar Provinsi Aceh, sampai saat ini belum ditemukan indikasi kontinjensi yang mengarah kepada operasi militer untuk perang. Kondisi ancaman mengarah kepada kontinjensi operasi militer selain perang. Dengan memperhatikan kecenderungan dinamika perkembangan potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan diperhadapkan dengan operasi militer selain perang, maka ancaman terhadap VVIP perlu diantisipasi, baik yang berasal dari eks kombatan, kelompok oportunistis, dan kelompok kriminal bersenjata. Ancaman lainnya adalah konflik sosial, pandemi covid 19, banjir, gempa bumi, gerakan separatisme, kebakaran hutan dan lahan, terorisme, dan ancaman pulau terluar di Provinsi Aceh	1	HK	SDM
		Strategi pembinaan dan pengelolaan sumber daya pertahanan di provinsi Aceh ditransformasikan sebagai elemen kekuatan nasional. Dihadapkan pada hakekat ancaman sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis yang berubah cepat, maka diharapkan ada perwujudan komponen cadangan yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana pendukungnya.	1	HK	I

		Pengembangan strategi dan postur Kodam dilaksanakan berdasarkan renstra Kodam tahun 2020 – 2024. Kodam Iskandar Muda melaksanakan pengembangan postur baik pengembangan kekuatan, kemampuan dan gelan kekuatan satua tempur, satuan bantuan tempur dan satuan komando wilayah. Pengembangan ini juga termasuk untuk mengamankan perkembangan sumber daya alam migas di Provinsi Aceh sebagai perwujudan sumber daya pertahanan sebagai kekuatan pertahanan matra darat yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara yang terintegrasi dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.	3	HK	I
		Kodam Iskandar Muda melakukan pembinaan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan terhadap beberapa partai lokal dengan identitas dan ideologi yang berakar dari GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Kodam Iskandar Muda melakukan kegiatan secara sinergis dengan lembaga terkait yang menangani hal ini seperti BIN, BAIS dan Polda Aceh.	3	HK	SDM
		Dalam konteks pengamanan objek vital nasional dan sumber daya alam migas, Kodam Iskandar Muda dan Kementerian ESDM berkolaborasi secara produktif. Sarana dan prasarana utama disediakan oleh Kodam, sedangkan akomodasi dan sumber daya pendukung disediakan oleh sektor ESDM.	2	HK	I
8	NS 8-Asisten Operasi KASAL	Secara umum TNI AL telah memetakan dan menempatkan aset, alutsista dan personel untuk mengamankan jalur Selat Malaka – laut Andaman yang menjadi salah satu jalur pelayaran internasional utama yang strategis bagi kepentingan Indonesia maupun dunia. Pembinaan integratif matra laut baik personel, alutsista dan pangkalan dilaksanakan secara sentralisasi	1	HK	I

		komando maupun desentralisasi			
		KRI dengan kemampuan operasional dan tempur termasuk pesawat udara dikerahkan Koarmada untuk melaksanakan operasi-operasi laut sampai dengan ZEE, sedangkan unsur-unsur KRI jenis Patrol Craft (PC), Kapal Angkatan Laut (KAL) maupun Alat Peralatan Pertahanan (alphanhan) lainnya seperti yang dimiliki oleh Lantamal melaksanakan patroli pengamanan laut secara terbatas di laut teritorial dan laut pedalaman	1	HK	I
		Pembinaan penegakan hukum dalam menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional di jalur Selat Malaka – Laut Andaman, seperti pengungsi, illegal drug traffic, penyelundupan barang, senjata dan lain-lain, dilaksanakan melalui kerja sama lintas Kementerian Lembaga nasional maupun dengan negara lain.	1	HK	I
		Jalur Selat Malaka – Laut Andaman adalah salah satu <i>choke point</i> penting kemaritiman, dan jalur <i>sea lines of communications</i> . Pengamanan laut yang dilaksanakan oleh TNI AL di jalur Selat Malaka berada di bawah kerangka kerja sama <i>quadrilateral</i> , yaitu Malacca Strait Sea Patrol (MSSP), bersama AL negara Malaysia, Singapura dan Thailand. Pengamanan laut yang dilaksanakan oleh TNI AL di Laut Andaman berada di bawah kerangka kerja sama bilateral dengan Indian Navy (IN) dalam bentuk PatkorIndindo. .	1	HK	I
		Sehubungan dengan persaingan kekuatan besar (Negara great powers) kawasan Indo-Pacific dalam konteks ketegangan di Laut Tiongkok Selatan (LCS) ditambah BRI/ OBOR yang diusung oleh Tiongkok, TNI AL melihat bahwa Indonesia akan dimanfaatkan sebagai jalur pendekat yang strategis oleh setiap pihak yang	1	HK	I

		berkepentingan untuk menuju maupun bergerak dari LCS sebagai <i>focal area</i> isu LCS			
		Mengingat selat Malaka merupakan jalur pelayaran strategis internasional yang telah ada sejak lama dan terdapat hak lintas transit yang menurut UNCLOS 1982 tidak boleh ditutupi/dihalangi, maka tidak mungkin dilaksanakan penguasaan penuh Selat Malaka oleh pihak manapun. Namun demikian, perebutan pengaruh negara-negara sekitar dan pembangunan pangkalan-pangkalan antar negara yang bersengketa di sekitar Selat Malaka merupakan ancaman potensial yang dapat terjadi.	1	HK	I
		Pada tingkat operasional, situasi dan kondisi di jalur LCS-Selat Malaka-Andaman akan menjadi semakin kompleks dan rawan akan munculnya permasalahan baik ancaman keamanan laut dari aktivitas ilegal nasional dan trans-nasional maupun permasalahan meningkatnya eskalasi konflik antar negara yang mengganggu stabilitas politik keamanan di wilayah	1	HK	I
		Berdasarkan perkiraan intelijen strategis jangka pendek, maka Indonesia memiliki beberapa ancaman yang berkaitan dengan Selat Malaka maupun efek dari konflik KCS, yaitu ancaman militer dan bersenjata baik yang potensial maupun aktual seperti pelanggaran wilayah, spionase dan sabotase. Ancaman non militer berupa penyelundupan ilegal (senjata, obat-obatan terlarang dan barang ilegal lainnya), perdagangan dan penyelundupan manusia, penangkapan ikan <i>ilegal</i> , pencurian dan perampokan di laut serta kecelakaan di laut.	1	HK	I

		Pasca perdamaian dengan GAM, keberadaan jalur-jalur yang digunakan untuk penyelundupan senjata hingga saat ini masih dimanfaatkan oleh aktor lain atau eks GAM untuk aktivitas ilegal seperti penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia dan barang. Garis pantai yang panjang terbentang di sepanjang Selat Malaka baik dari sisi Indonesia, Malaysia maupun Thailand serta keberadaan pelabuhan “tikus” atau pelabuhan tidak resmi dan tidak berizin menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum di laut pasca perdamaian dengan GAM. Pembinaan keamanan laut terkait hal ini memerlukan kerja sama dalam bentuk pertukaran informasi atau intelijen, patroli udara dan patroli laut serta koordinasi dengan aparat di negara tetangga. Mengingat ancamannya berupa aktor trans-nasional, maka pendekatan yang diterapkan adalah interoperabilitas antaer instansi/ agensi maupun lintas negara.	1	SB	SDM
9	NS 9 Panglima Komando Armada I	Prediksi ancaman dinamika perkembangan lingkungan strategis dalam tataran global, regional dan nasional turut serta mempengaruhi perkembangan dinamika ancaman yang dapat membahayakan dan mengganggu keutuhan, kedaulatan dan keselamatan NKRI. Adapun prediksi ancaman yang mungkin dihadapi TNI AL ke depan, yaitu : ancaman luar negeri yang merupakan ancaman dari aktor negara yang akan dihadapi dengan OMP yaitu USA dengan kepentingan melakukan serangan terhadap Tiongkok di LCS karena mengganggu aktivitas FONOPS Amerika Serikat dan sekutu, yang akan berimbas Indonesia menjadi daerah <i>spill over</i> . Juga klaim sepihak nine dash line Tiongkok terhadap LCS.	1	HK	I
		TNI / TNI AL telah melaksanakan MoU dengan BPMIGAS/ SKK	2	HK	SDM

		Migas (sesuai keputusan Pemerintah) dalam rangka membantu pengamanan objek vital nasional lepas pantai yang secara teknis dengan penugasan Perwira TNI AL sebagai Liaison Officer Migas yang dapat langsung berkoordinasi dengan Kotamaops TNI AL			
10	NS 10 – Deputi IV Koordinasi Pertahanan Negara PolHuKam	Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2021 yang substansinya antara lain; Perkuatan posisi pertahanan Indonesia dengan meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara lain dengan memprioritaskan pada negara tetangga yang berbatasan langsung negara di kawasan ASEAN dan kawasan Indo Pasifik serta negara yang memiliki kerjasama pertahanan dengan Indonesia guna kepentingan nasional.	3	HK	R
		Arah kebijakan Indonesia terkait peran Tiongkok dan India (India termasuk negara penggagas Indo Pacific Bersama Amerika) termasuk menjaga situasi di LCS agar kondusif, yakni saat ini Indonesia memandang isu (permasalahan) di Laut Tiongkok Selatan (LCS) memiliki dua konteks yaitu rivalitas AS-Tiongkok, dan sengketa wilayah akibat klaim unilateral RRT atas nine dash line. Terhadap permasalahan tersebut, Indonesia akan pada permasalahan yang muncul dari konteks klaim unilateral RRT tersebut, dan menghindari memberi reaksi yang mengesankan keberpihakan kepada salah satu kubu (AS/Tiongkok).	1	HK	SDM
		Demikian juga di Laut Andaman, apabila memang terlihat ada rivalitas antara India dan Tiongkok di sana (Tiongkok sdg membangun jalur dari daratan Tiongkok sampai ke Pelabuhan di Myanmar/laut Andaman), maka Indonesia akan menghindari	1	HK	SDM

		memberi reaksi yang mengesankan keberpihakan kepada salah satu kubu (AS/Tiongkok).			
		Indonesia memiliki batas laut dengan india, untuk batas Landas Kontingen (LK) sudah disepakati oleh kedua belah negara. Perjanjian 1974 (Segmen Laut Andaman) dan Perjanjian 1977 (segmen Perpanjangan). Sedangkan untuk batas ZEE masih dalam tahap diplomasi, dikarenakan India berprinsip <i>Single Maritime Boundary Line</i> untuk LK dan ZEE dan RI berpedoman <i>Different Maritime Boundary Line</i> karena garis ZEE dan LK menurut UNCLOS 1982 adalah rezim zona maritim yang berbeda.	1	HK	R
		Peningkatan Hubungan antara RI – India diharapkan dapat memberikan keseimbangan Hubungan Indonesia dengan Negara – negara Kawasan.	1	P	R
		Terkait arah politik luarnegeri bebas aktif, tentunya segala bentuk kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara lain sangat dimungkinkan. Demikian juga dengan kemungkinan adanya akses kapal selam India (bukan KS nuklir) untuk berlabuh di Sabang, merupakan sesuatu hal yang bisa diperjanjikan, selama tidak bertentangan dengan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain menjadikan Kawasan Asia Tenggara sebagai <i>ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutral)</i> yang terbebas dari adanya senjata nuklir dan persaingan perlombaan senjata dari negara-negara besar.	3	P	R
		Indonesia menolak mengakui Klaim sepihak Tiongkok terkait nine dash line bersinggungan dengan ZEE indonesia di wilayah perairan Natuna.	1	HK	R

		Tiongkok memiliki kepentingan nasional untuk tetap mempertahankan Pangkalan yang dibangun di Kepulauan Spratly sebagai wilayah teritorial Tiongkok dengan mengacu pada <i>nine dash line</i> yang diklaim sepihak oleh Tiongkok tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).	1	HK	I
		Indonesia perlu memanfaatkan Geopolitik dan Geostrategi yang dimiliki sebagai dukungan dalam proses diplomasi dengan negara kawasan, khususnya dengan Tiongkok.	1	P	SDM
		Kondisi saat ini Aceh memiliki perkembangan yang sangat bagus, baik dari aspek ekonomi, demokrasi dan pertahanan negara. Dinamika pembangunan di Aceh searah dengan pembangunan nasional.	1	P	SDM
		Aceh berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi pemerintahan dengan dasar UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh maupun dalam pengelolaan Sumber daya alamnya sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh.	3	E	R
		Dimungkinkan masih terdapat hal-hal kecil sebagai dampak residu masa lalu, namun hal tersebut belum masuk ke dalam wilayah aspek Pertahanan Negara.	3	P	SDM
11	NS -11 Direktur Jenderal Strategi Pertahanan,	Perumusan kebijakan strategis pertahanan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan strategi dan produk strategis pertahanan negara. Kebijakan strategi adalah dalam bentuk Kebijakan Umum	3	HK	R

u.p SetDitJen Strategi Pertahanan	Pertahanan Negara, Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara, dan Kebijakan Pertahanan Negara. Produk strategis : Doktrin Hanneg, Strategi Hanneg, Postur Hanneg, dan Buku Putih Hanneg			
	Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan	3	HK	SDM
	Kerjasama Internasional untuk kepentingan pertahanan negara, meliputi antara lain tentang pengerahan TNI dalam pengamanan perbatasan, Tata Kelola perlindungan terhadap informasi strategis	3	HK	SDM
	Pembinaan wilayah pertahanan, meliputi antara lain penataan wilayah pertahanan, pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar	3	HK	R
	Penataan ruang termasuk untuk kepentingan pertahanan keamanan memperhatikan antara lain geostrategi, geopolitik dan geoekonomi	1	HK	R
	Pemberdayaan wilayah pertahanan dihadapkan pada perkiraan strategis tentang kemungkinan ancaman yang timbul pada lapis mandala pertahanan luar yang berada di luar zona ekonomi eksklusif, mandala pertahanan utama mulai dari ZEE hingga batas laut teritorial termasuk wilayah udara di atasnya, serta mandala pertahanan dalam pada wilayah belakang di luar mandala utama	1	HK	I
	Terkait dengan kegiatan migas lepas pantai Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari Objek Vital Nasional yang	3	HK	R

		bersifat strategis, tidak lagi mengatur khusus pelibatan bidang pertahanan oleh KemHan maupun bersama TNI			
		Postur pertahanan Indonesia mengacu pada doktrin dan strategi defensif aktif. Termasuk di dalamnya adalah mengoptimalkan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam mengelola wilayah perbatasan negara, terintegrasi dengan peran dan fungsi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah	3	SB	R
12	NS -12 DirJen Hukum dan Perjanjian Internasional	Rezim landas kontinen dan rezim zona ekonomi eksklusif diatur secara berbeda dalam UNCLOS 1982	1	P	R
		Harus dibedakan hak berdaulat dan kedaulatan di seluruh perbatasan laut Indonesia	1	P	R
		Belum ditemukan preseden model penyelesaian perkara klaim, dalam hal batas klaim negara kepulauan tumpang tindih dengan klaim negara pantai	1	P	R
		Terkait dengan perbatasan landas kontinen Laut Andaman – Aceh, sejauh ini telah disepakati beberapa perjanjian dengan India, Thailand dan Malaysia. Tidak ada masalah	1	P	R
13	NS 13 – Penjab Tim Kajian MoU Helsinki dan UUPA	Masih diperlukan lagi kerja keras kedua pihak dalam implementasi UUPA di Aceh, di satu Pihak Pemerintah Aceh belum sepenuhnya berpedoman dengan UUPA dalam Tata kelola Pemerintahan di Aceh yang telah dijalankan selama 15 tahun berlakunya UUPA untuk Aceh. Di pihak lain Lembaga dan Departemen di Pemerintahan Pusat masih menggunakan	3	P	R

		platform lama hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh/Daerah. Lembaga dan Departemen Pemerintah Pusat belum menjadikan UUPA serta regulasi lanjutannya berupa Qanun Aceh sebagai basic idea dalam kebijakannya untuk Aceh. Ketentuan adanya Konsultasi dengan Pemerintah Aceh dalam setiap penerbitan Kebijakan oleh Pemerintah Pusat, sering sekali diabaikan (MoU menyebutkan Konsultasi dan Persetujuan).			
		Kondisi Qanun Aceh hampir sama dengan nasib Perdasus UU Otsus Papua. Regulasi-regulasi baru setelah ditanda tangannya MoU Helsinki dan berlakunya UUPA, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat bukan saja mengabaikan MoU Helsinki, tapi juga mengabaikan UUPA yang notabene adalah Produk Hukum Khusus Pemerintah Pusat (Presiden dan DPR RI).	3	P	R
		Ini merupakan kondisi ironi dari maksud dari isi Kesepakatan MoU Helsinki yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka dan disaksikan oleh Masyarakat Dunia pada Tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia.	3	P	SDM
		Hubungan kerjasama antara Partai Politik lokal dan Partai Nasional saat ini terlihat harmonis dan sejalan, termasuk issue-issue yang diusung kedua pihak sejalan dengan kewenangan masing-masing Partai Politik.	3	P	R
		Dalam ketentuan PP Nomor 23 tahun 2015 Tentang Pengelolaan sumber daya alam migas , pemberian kewenangan kepada Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA),	2	P	R

	perlu diperluas dan diperkuat guna otonomisasi Kelembagaan tersebut. Ada kewenangan yang masih abu-abu antara Gubernur Aceh dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Proses Konsultasi atas kewenangan Kementerian ESDM dengan Gubernur Aceh dan Kepala BPMA perlu diatur lebih lanjut, agar dapat dibuat regulasi yang efektif dan efisien untuk Aceh guna peningkatan Sumber Pendapatan dari Bidang Minyak dan Gas Bumi, termasuk penentuan Harga Gas Bumi di Aceh yang harus diputuskan secara bersama antara Pusat dan Aceh untuk memberikan insentive bagi Investasi Bidang Minyak dan Gas Bumi serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang telah beroperasi di Aceh.			
	Terkait konsolidasi, integrasi dan partisipasi para aktor pembangunan di Aceh, baik yang berasal dari ex GAM maupun Non GAM. Konsolidasi, Integrasi dan partisipasi semua aktor di aceh untuk pembangunan berjalan secara baik dan lancar. Tidak terlihat perbedaan antara aktor-aktor pembangunan ini dalam akselerasi bersama membangun Aceh. Semua berjalan sesuai mekanisme dan sistem yang berlaku.	3	I	SDM
	.Terkait kontribusi dan partisipasi korporasi dan perusahaan jasa penunjang migas yang beroperasi di Aceh untuk memajukan perekonomian daerah; Kontribusi dan partisipasi korporasi jasa penunjang migas yang beroperasi di aceh masih sangat minim, ini tercermin dari Pendapatan Asli Daerah yang masih minim, sehingga sampai saat ini Aceh masih sangat bergantung pada transfer Dana APBN Pusat untuk membiayai Aparatur maupun Pembangunan	3	E	SDM

		perekonomian			
14	NS 14 – Deputi Dukungan Bisnis SKKMigas	<p>Terkait dengan pengamanan pengawasan aset hulu migas dan penanganan gangguan pada kegiatan operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.</p> <p>Sebagian besar WK Migas Indonesia yang aktif di wilayah perbatasan laut (Aceh, NATUNA Barat-Utara-Timur), berada di luar wilayah kedaulatan laut teritorial 12 mil laut, tetapi berada di wilayah yurisdiksi hingga landas kontinen. Terkait dengan penegakan hukum, pengamanan aset maupun operasi di wilayah tersebut, dalam MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditanda tangani SKKMigas, apakah lingkupnya mempertimbangkan hal tersebut.</p> <p>(Mis. Kepolisian RI hingga batas 12 mil laut, dan TNI AL di luar itu hingga landas kontinen/ ZEE atau bagaimana)</p> <p>Pada dasarnya pengamanan obyek vital yang di kelola KKKS menjadi tanggungjawab KKKS (ref Kepres 63 Tahun 2004 Pasal 4), jika KKKS membutuhkan dukungan pengamanan dari aparat keamanan maka akan di fasilitasi oleh SKKMigas dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS).</p> <p>Ruang lingkup yang ada di PKS pun mengacu kepada kesepakatan antara SKKMigas dengan TNI-Polri sesuai kebutuhan KKKSnya, namun disitu tidak menutup kemungkinan kebutuhan insidental bisa dilakukan permintaan tambahan dengan mempertimbangkan kewenangan masing-masing (TNI/Polri) sesuai regulasi yang ada.</p> <p>Keputusan Presiden No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, pasal 4</p>	2	HK	R

		Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional			
		<p>b. Terkait dengan perbedaan spesifik ruang lingkup kerja sama pengamanan fasilitas dan operasi migas antara TNI Angkatan Laut dengan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) BAKAMLA mengacu pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan terutama pada bab IX pasal 59 ayat 3. TNI AL mengacu kepada Undang - Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI terutama pasal 8 dan pasal 9</p> <p>(1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan pasal 59 ayat 3 Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Penjelasan pasal tersebut berbunyi “cukup jelas”</p> <p>(2) Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 8 Angkatan Darat bertugas : 1) Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga wilayah perbatasan darat dengan negara lain 2) Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain 3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan</p>	2	HK	R

		<p>pengembangan kekuatan matra darat; serta</p> <p>4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat</p> <p>Pasal 9</p> <p>Angkatan Laut bertugas :</p> <p>1) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan</p> <p>2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi</p> <p>3) Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah</p> <p>4) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta</p> <p>5) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut</p>			
		<p>Terkait dengan kerja sama dalam konteks penguatan kegiatan teritorial TNI Angkatan Darat di daerah operasi migas</p> <p>Mengacu kepada regulasi yang ada, TNI AD tidak dalam kapasitas pengamanan tetapi sebagai komunikasi sosial yang dilakukan oleh babinsa (Bintara Pembina Desa) yang memiliki kewilayahan (sebagai humas yang mensosialisasikan bahwa ada fasilitas negara di wilayah mereka). Agar terkoordinasi dengan baik dan berdampak positif serta ada analisa dan evaluasi yang terstruktur, maka dibuatkan perjanjian kerja sama, dimana secara institusi TNI AD terlibat agar kegiatan operasional migas tidak terganggu.</p>	3	HK	SDM
		<p>Terkait dengan isu spesifik di perbatasan, yaitu provokasi kapal survey RRT di dalam wilayah landas kontinen Indonesia, di laut</p>	2	HK	R

		<p>Natuna Utara, di mana satu Kontraktor Kerja Sama Migas sedang melaksanakan aktivitas migas (pengeboran), di area yang juga diklaim RRT sebagai bagian dari nine dash line.</p> <p>SKK Migas mengandalkan kerja sama dengan TNI AL. Hal tersebut telah diatur dalam klausul kebutuhan insidental/ non rutin dalam Memorandum of Understanding (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara SKK Migas dengan TNI AL.</p>			
15	NS 15 Presiden Direktur PT Perta Arun Gas	<p>Di Kilang Eks Arun terdapat 6 unit LNG Train dengan Total Kapasitas 12.5 MTPA dimana terhitung akhir tahun 2014 semua fasilitas liquefaction berhenti beroperasi karena produksi gas menurun dan komitmen kontrak dengan LNG buyer berakhir. Adapun sisa gas (tail gas) yang bersumber dari Lapangan NSO dan NSB di olah di fasilitas treating unit 35 yang saat ini di operasikan oleh PT PHE NSO</p>	2	E	I
		<p>Saat ini PT Perta Arun Gas memiliki fasilitas LNG Regasifikasi yaitu Open Rack Vaporizer (ORV). Dengan Total Design capacity dari ORV tsb yaitu 405 MMscfd atau setara 2,7 Mtpa (3 ORV, @ 135 MMscfd) dengan pola operasi "n+1" dimana utilization rate saat ini \pm 32%. Dengan LNG storage berjumlah 2 (dua) unit (design capacity 127.000 m³/unit) untuk konsumsi Domestik. Dengan kapasitas LNG regasifikasi yang di miliki PAG saat ini, sejatinya dapat mendukung pertumbuhan kegiatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhoseumawe (KEKAL) yaitu dengan tersedianya / jaminan supply gas (LNG) yang berkecukupan.</p>	2	E	I
		<p>Strategi PAG dalam menjalankan bisnis LNG Hub yaitu dengan memanfaatkan strength point yang dimiliki PAG dan menjadi daya jual kepada potential customer, diantaranya :</p>	2	E	I

	<p>(1) PAG Hub berada di lokasi yang strategis yaitu di jalur pelayaran perdagangan internasional (Selat malaka).</p> <p>(2) PAG merupakan pengelola (Operator) Pusat Logistik Berikat (PLB) pertama dan satu-satunya untuk komoditi LNG di Indonesia.</p> <p>(3) Berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEKAL) Arun-Lhokseumawe, dimana kegiatan investasi dengan nilai tertentu (diatas 80 Milyar) potensi mendapatkan berbagai fasilitas insentif seperti terkait pajak, bea cukai, lalu lintas barang dan fasilitas lain. Yang akan mendukung keekonomian proyek investasi</p> <p>(4) Untuk menambah daya tarik potential customer, PAG juga menawarkan beberapa additional service diantaranya : Gassing Up and Cooling Down (GUCD), Marine Bunkering and ISO Tank LNG Filling.</p>			
	<p>Secara bertahap dan jangka panjang PAG memiliki goals untuk menjadikan asset ex Arun sebagai LNG Hub terbesar di kawasan Asia Tenggara.</p> <p>Terkait rencana pemanfaatan ex fasilitas train LNG termasuk tangki tangki penampungan kondensat dan by produknya.</p> <p>PAG telah memiliki Road map terkait rencana revitalisasi asset ex PT Arun dan merupakan bagian dari rencana bisnis Perusahaan (RJPP dan RKAP). Implementasi dari program kerja mengikuti kepada pencapaian komitmen awal dengan Potential customer serta pertimbangan keekonomian bisnis.</p> <p>Secara bertahap PAG akan melakukan revitalisasi Asset Arun diantaranya untuk kegiatan LNG Hub (Penambahan Storage capacity), LNG / Fuel Oil Bunkering, Pemanfaatan energi dingin (<i>Integrated Cold Storage</i>), LPG Bunkering termasuk sebagai Hub</p>	2	E	I

		untuk produk <i>Crude</i> (pemanfaatan <i>ex condensate storage</i>) serta potensi bisnis lainnya, dengan konsep dasar pemanfaatan asset <i>ex Arun</i> seoptimal mungkin untuk mendapatkan efisiensi biaya investasi dan daya saing.			
		<p>Terkait dengan sinergitas dan sinkronisasi PT PAG dengan Pemda Provinsi NAD dalam kerangka pembangunan wilayah : PAG memiliki relasi yang cukup harmonis dengan semua stake holder di Kota Lhokseumawe maupun di tingkat propinsi Aceh dan ini merupakan kontribusi yang dapat di berikan oleh PAG untuk wilayah operasinya.</p> <p>Upaya – upaya dalam pemberdayaan pembangunan wilayah dilakukan dalam kerangka koordinasi dengan peran sebagai regulator (Bea Cukai terkait aktivitas Bisnis LNG Hub yang dilakukan oleh PAG di Kilang Eks Arun) maupun terkait potensi pengembangan bisnis yang berpotensi memberikan multiplier effect bagi perekonomian aceh melalui berkordinasi dengan Administrator KEK Arun Lhokseumawe aktivitas bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL).</p> <p>Disamping kerjasama bisnis, PAG juga berperan aktif dalam pemberdayaan universitas lokal, melalui memberi kesempatan keterlibatan dalam kajian-kajian engineering / FEED atas beberapa proyek inisitif di asset <i>ex Arun</i> sesuai kompetensi yang dimiliki.</p> <p>Termasuk juga program magang <i>full day</i> mahasiswa (semester 3 & 5) Politeknik Lhokseumawe yang rutin berlangsung sejak PAG beroperasi di tahun 2015 hingga saat ini. Dengan satu tujuan agar generasi muda Aceh memiliki peluang untuk berkembang</p>	3	E	SDM

		dan mandiri dengan memiliki kompetensi di sektor Migas.			
16	NS 16 – Direktur Utama PT PGN	<p>Terkait peran PGN group dalam sinergitas industri migas nasional, sebagai sub holding Gas PT Pertamina (Persero).</p> <p>PGN sebagai sub holding gas (SHG) mengelola transisi energi Pertamina menuju energi baru terbarukan. SHG berperan meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi melalui pengembangan infrastruktur. Infrastruktur dikembangkan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu integrasi (integrasi antar infrastruktur yang sudah beroperasi maupun dengan infrastruktur baru yang akan dibangun) dan fleksibilitas (kombinasi moda non pipa dan pipa untuk kecepatan pembukaan pasar. SHG melakukan kerjasama dalam bentuk sinergi dan kolaborasi dengan sub holding lainnya untuk optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan gas pipa dan LNG secara nasional dan terintegrasi di Pertamina Group. SHG memperluas pasar pemanfaatan gas untuk berbagai segmen pengguna, di antaranya program gasifikasi kilang-kilang di Indonesia, pengembangan jargas untuk rumah tangga sebagai upaya untuk menekan/ mengurangi impor PLG (pengembang retail), konversi bahan bakar transportasi darat dan laut dari BBM ke gas (CNG dan LNG), konversi bahan bakar diesel ke gas bumi untuk pembangkit listrik. Hal ini tidak hanya akan berimplikasi secara bisnis namun juga sebagai wujud dalam penerapan komitmen Pertamina mendukung <i>Environmental, Social and Governance (ESG)</i> untuk mencapai target <i>zero carbon</i> di tahun 2050.</p>	3	E	I
		Terkait hubungan kerja sama PGN dengan KKS upstream penghasil gas di Aceh, baik KKS dalam Pertamina group seperti	3	E	I

	<p>PT PHE NSO maupun KKS lain yang beroperasi di darat maupun <i>offshore</i>.</p> <p>Di NAD dan Sumbagut, PGN mengelola <i>stakeholder relations</i> dengan SKK Migas selaku regulator, KKKS selaku Produsen, Pertagas selaku Transporter, dan para pengguna gas melalui kegiatan Gas Coordination Meeting (GCM) secara rutin pada setiap bulannya. Forum GCM membahas setiap permasalahan atau kendala yang mempengaruhi kegiatan operasional secara komprehensif untuk segera diputuskan solusinya.</p> <p>Dalam penguatan sinergi antara sub holding upstream (SHU) dan Subholding Gas (SHG), dilaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan pembinaan oleh Pertamina (Direktorat Strategi, Portfolio, dan Pengembangan Usaha serta Direktorat Logistik dan Infrastruktur) untuk menyelaraskan rencana dan strategi pengembangan infrastruktur dan bisnis, dalam rangka peningkatan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan gas bumi secara berkelanjutan.</p>			
	<p>Terkait dengan koordinasi untuk monetisasi gas dari <i>offshore</i> maupun <i>onshore</i>.</p> <p>Untuk mendukung peningkatan pemanfaatan gas bumi, SHG mengembangkan infrastruktur dengan pendekatan integrasi (integrasi antar infrastruktur yang sudah beroperasi maupun dengan infrastruktur baru yang akan dibangun). Prioritas pertimbangan suplai gas dengan memetakan lokasi pemanfaatan rencana skema infrastruktur sebagai moda penyaluran gas berdasar pada:</p> <p>(1) Tersedianya kepastian konsumen namun diperlukan dukungan alokasi dan harga gas</p>	2	E	I

		<p>(2) Tersedianya potensi demand namun diperlukan konfirmasi/ survey lebih mendalam</p> <p>(3) Tersedianya potensi demand untuk gas bumi tertentu dan <i>petrochemical wellhead</i></p> <p>Mengingat banyak tantangan dalam memonetisasi lapangan gas bumi, maka PGN sangat memerlukan dukungan Pemerintah (SKKMigas dan DitJen Migas) berupa insentif yang dapat membuat potensi pemanfaatan lapangan gas dapat layak secara keekonomian</p>			
		<p>Terkait dengan koordinasi antara PGN group dengan Pemerintah Aceh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri berbasis gas di Provinsi Aceh ;</p> <p>Sesuai dengan penugasan dari Pertamina, PGN siap berpartisipasi pada konsorsium PT Patriot Nusantara Aceh (PATNA) sebagai pemegang saham setelah dilaksanakan pemetaan lebih lanjut terkait potensi pengembangan sektor minyak dan gas pada kawasan ekonomi khusus Arun – Lhok Seumawe (KEKAL) oleh PATNA.</p>	2	E	I

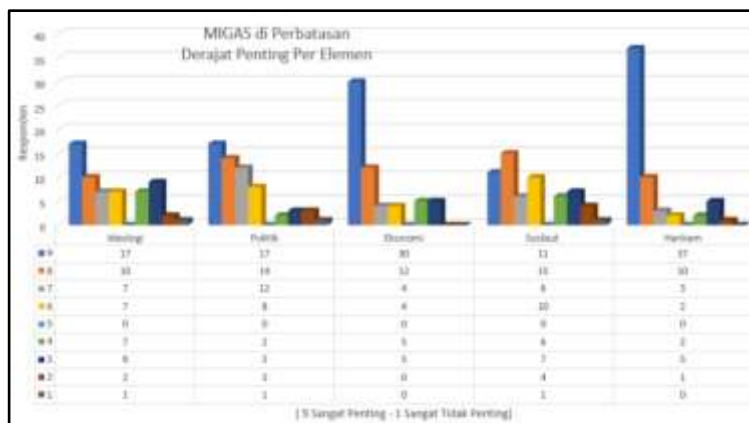
Sumber : Wawancara Narasumber

Lampiran 6 Pra AHP kuesioner

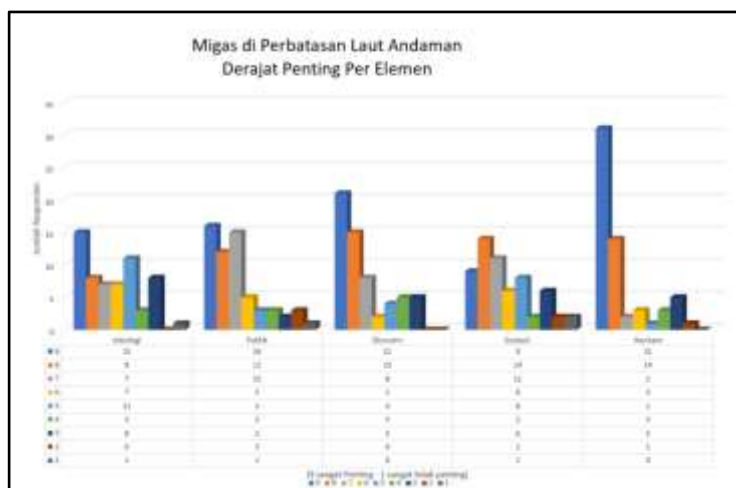
Familiaritas responden terhadap perbatasan



Grafik Derajat penting per elemen di perbatasan



Grafik Derajat penting per elemen di Perbatasan Laut Andaman



Lampiran 7 : Peta Wilayah Pertahanan dan Matra Satuan

1. Wilayah Pertahanan Republik Indonesia



2. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan



Sumber : Presentasi KoArmada II , Seminar Pertahanan Negara Kepulauan, Juni 2021

3. Gelar Permanen TNI AL



Sumber : Presentasi SRENA MABESAL, Seminar Sishankamrata Jun 2021

4. Peta Sebaran Wing dan Skadron Udara RI

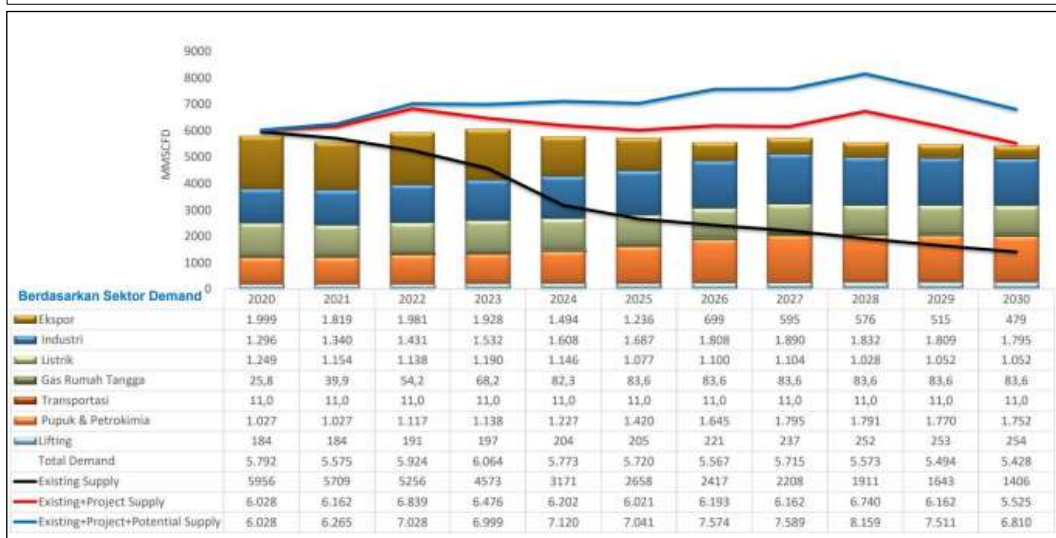
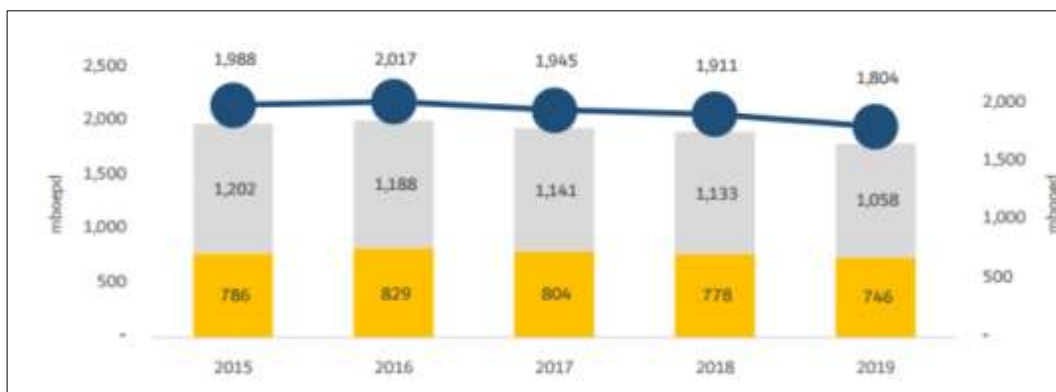


Sumber : Mabes TNI AU – Seminar Sishankamrata, Juni 2021

Lampiran 8 Kategori Responden AHP

	Kategori	Jumlah	TNI Polri	ASN	Korporasi & Swasta	PATI/ Eselon 1/ Manajemen/	Pimpinan Operasional /	Profesional
Kode	Profesi	Jumlah	LATAR BELAKANG			JABATAN		
K-01	Peneliti Ahli Utama Transportasi Laut	iv		1			1	
K-02	Offshore Lead Engineer Pertamina	ii			1			1
K-03	Staf Ahli Kemendagri	iv		1		1		
K-04	Owner Corporate Private	iii			1			
K-05	Deputi Geofisika BMKG	iv		1		1		
K-06	Skr. Badan Geologi KESDM	i		1			1	
K-07	Visiting Researcher Prof. UK	vi		1				1
K-08	Dosen UNHAN ex DirJen - TNI AD	iv	1			1		
K-09	Offshore Specialist Engineer	ii			1			1
K-10	Komisaris Utama BUMD Energi	ii			1	1		
K-11	Jurnalis Sosial Politik Ekonomi	v			1			1
K-12	Staf Ahli MPR RI	v			1			1
K-13	Staf Khusus Menteri PUPR - Lecturer	iv		1		1		
K-14	Wirawasta - Ex DPDR	iii			1	1		
K-15	Wakil Rektor UGM	vi		1		1		
K-16	Pensiunan Profesional PSC	ii			1			1
K-17	General Manager PSC	ii			1	1		
K-18	Ex Direktur BNPT - Marinir TNI AL	iii	1			1		
K-19	Inspektur IV - KESDM	i		1			1	
K-20	Praktisi dan Pengamat Hulu Migas	ii			1			1
K-21	Diplomat	iv		1				1
K-22	Executive Director Oil Service Coy	iii			1	1		
K-23	Pengusaha - Anggota DEN	i			1	1		
K-24	Rektor Universitas Syiah Kuala - Aceh	vi		1		1		
K-25	Peny. Kurikulum Fak. Keamanan Nas	vi	1				1	
K-26	Direktur Infrastruktur Migas - KESDM	i		1			1	
K-27	WaKaPolda - Polri	iv	1			1		
K-28	TaProf Lemhannas - Purn TNI AL	vi	1			1		
K-29	Deputi 7 Kemenko Polhukam - TNI AU	iv	1			1		
K-30	Dosen Filsafat - Rohaniwan	vi			1			1
K-31	Direktur BBM - BPHMIGAS	i		1			1	
K-32	Ka Biro Umum DEN	i		1			1	
K-33	Staf Ahli Kemenko PMK	i		1		1		
K-34	Alumni Se Ketahanan Energi UNHAN	v			1			1
K-35	Pusinfo Strathan KEMHAN - TNI AD	iv	1				1	
K-36	Deputi Perencanaan SKKMIGAS	i		1		1		
K-37	Deputi Dukungan Bisnis SKKMIGAS	i		1		1		
K-38	Cendekiawan ISNU	v			1			1
K-39	Komisaris Integrated Energi Corp	ii			1	1		
K-40	Pekerja Senior Pertamina	iii			1	1		
K-41	Kepala BPHMIGAS 2017 - 2021	i		1		1		
K-42	Deputi Keu. dan Monetisasi SKKMigas	i		1		1		
K-43	Deputi Operasi SKKMIGAS	i		1		1		
K-44	Staf Ahli PI SKKMIGAS	ii		1			1	
K-45	Senior Advisor Non Govt Organization	v			1			1
K-46	Lecturer, Ex Pimpinan KPK	vi			1	1		
K-47	Tenaga Ahli Utama, Kantor Staf Presiden	i		1		1		
K-48	Komite BPHMIGAS, Energy Analyst	i		1		1		
K-49	Koord Nasional PWYP - Indonesia	v			1			1
K-50	Advokasi Kebijakan Publik - NGO Aceh	v			1			1
K-51	Analisis di Mabes TNI AD	iv	1				1	
K-52	Komandan Satuan Zeni TNI AD	iv	1				1	
K-53	Analisis Kebijakan WANTANNAS, TNI AU	iv	1				1	
K-54	Ex Kas KoGab WIIHAN II - TNI AD	iii	1			1		
K-55	KaRo Srena di Mabes Polri	iv	1			1		
K-56	ex Analisis BARESKRIM, POLRI	iv	1			1		
K-57	PaMen di KoDam Hasanuddin - TNI AD	iv	1				1	
K-58	Dosen Lemhannas, TNI AU Purn	vi	1			1		
K-59	PaMen Ren Keu di Kem, Han - TNI AD	iv	1				1	
K-60	General Advisor Security Migas - Polri	iii	1			1		
	Jumlah		17	22	21	32	14	14

Lampiran 9 Kinerja Supply Demand Minyak dan Gas Nasional



Lampiran 10 Kinerja Capaian Ditjen Migas 2015 - 2019

No.	Indikator Kinerja	Capaian Ditjen Migas Periode Renstra 2015-2019					Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Produksi/Lifting energi fosil						
	a. Lifting minyak bumi	786	829	804	778	746	MBOEPD
	b. Lifting gas bumi	1.202	1.188	1.141	1.133	1.058	MBOEPD
2	Penandatanganan KKS Migas	12	1	0	11	6	Kontrak
3	Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri						
	a. Dalam Negeri	55,68	58,29	58,64	59,95	64,90	%
	b. Ekspor	44,32	41,71	41,36	40,05	35,10	%
4	Akses dan Infrastruktur BBM						
	a. Volume BBM bersubsidi	14,9	14,3	15,0	16,1	16,8	juta kL
	b. Kapasitas Kilang BBM	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	MBPD
5	Akses dan Infrastruktur gas bumi						
	a. Volume LPG bersubsidi	5,57	6,01	6,31	6,55	6,84	Juta Ton
	b. Pembangunan Jargas Kota	2	6	8	18	16	Lokasi
	APBN	7,64	88,93	49,93	89,73	74,50	Ribu SR
	Non APBN	12,72	10,22	3,74	0,52	0	Ribu SR
	(kumulatif)	220,36	319,51	373,19	463,44	537,94	Ribu SR
	c. Pembangunan Infrastruktur SPBG	49	6	7	0	1	Unit
	- APBN	37	2	0	0	0	Unit
	- Non APBN	12	4	7	0	1	Unit
	d. Kapasitas Terpasang Kilang LPG	4,63	4,63	4,74	4,74	4,74	Juta Ton

No.	Indikator Kinerja	Capaian Ditjen Migas Periode Renstra 2015-2019					Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	
	e. FSRU/Unit Regasifikasi/Terminal LNG	0	0	1	0	2	Unit
6	Penerimaan Negara dari Sub Sektor Migas	136,04	86,11	139,14	214,61	185,44	Triliun RP
7	Investasi daari Sub Sektor Migas	17.984,0	12.736,1	11.039,9	12.685,2	12.935,4	Juta USD
8	Persentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas	75.1	0	92/180	102/200	119/225	Perusahaan

Sumber : Ditjen Migas, Kementerian ESDM 2021

Lampiran 11 Program BBM Satu Harga

PROGRAM BBM SATU HARGA 2020-2024 330 Penyalur		2020	2021	2022	2023	2024
		83 Penyalur	76 Penyalur	72 Penyalur	56 Penyalur	43 Penyalur
1. NAD	1		3	3	1	-
2. Sumatera Utara	2		2	2	-	2
3. Riau	2		-	-	-	-
4. Kepulauan Riau	2		1	-	1	1
5. Sumatera Barat	-		1	-	1	1
6. Bengkulu	1		-	-	1	1
7. Sumatera Selatan	2		2	1	-	-
8. Lampung	3		2	1	1	-
9. NTB	5		5	4	3	2
10. NTT	16		12	11	10	4
11. Kalimantan Barat	7		8	4	4	3
12. Kalimantan Timur	1		-	-	-	-
13. Kalimantan Tengah	-		2	2	2	1
14. Kalimantan Selatan	1		2	1	-	-
15. Kalimantan Utara	4		3	3	3	3
16. Sulawesi Utara	-		3	1	-	1
17. Sulawesi Tengah	4		4	2	3	1
18. Sulawesi Tenggara	-		1	1	-	-
19. Sulawesi Selatan	2		1	1	-	-
20. Gorontalo	1		-	1	2	-
21. Maluku	8		7	7	2	3
22. Maluku Utara	7		7	8	5	5
23. Papua	8		5	11	11	9
24. Papua Barat	6		5	8	6	6

Berdasarkan
SK Dirjen
Migas No.
0008.K/15/
DJM.0/2020
tanggal 13
Januari 2020

Sumber : Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020 – 2024

<https://geoportal.esdm.go.id/migas/>

<https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart>

Lampiran 12

Dokumentasi

Interview dengan DirJen Hukum dan Perjanjian Internasional - KemLu



Interview dan diskusi dengan IrJen Kemhan, SesDitJen Strathan Kemhan dan Mabes TNI



Interview dan diskusi dengan DeOps BPMA dan Tokoh Masy. Aceh



Studi Banding Wilayah Perbatasan Migas – Energi – Maluku



Diskusi dengan Tim Promotor



Diskusi dengan Tim SKK Migas



RTD 1 dengan Guru Besar ITB – Guru Besar UI – Dir. Hulu Migas, KESDM



RTD 2 dengan Deputi Operasi BAKAMLA, DirJen Strathan 8 - Lemhannas



Seminar Hasil Penelitian



Konsultasi dan minta petunjuk Direktur Program Doktor UNHAN



Sidang Pra Tertutup Disertasi



Sidang Terbuka Disertasi 17 Pebruari 2022 – Aula Merah Putih – Sentul

SIDANG PROMOSI TERBUKA

KEBIJAKAN PENGELOLAAN MIGAS DALAM PERSPEKTIF PERTAHANAN NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN LAUT ANDAMAN ACEH

Sampi L. Purba
NIM. 22030221002

1. Ketua sidang / Penguji Internal 1: Megas TW Di, S.H., S.P., S.S., S.M., OGH, OGH, IPA
 2. Promotor 1: Prof. Dr. Fawzan Yaqubov, B.Sc., M.A., B.D
 3. Dr. Promotor 1: Faldan Lari (M) Dr. Ir. Yudi Dal Kusuma, M.S
 4. Dr. Promotor 2: Dr. Ing. H. Andhaz Juslita, Dpt. Ing.
 5. Penguji Internal 1: Megas TW Di, S.H., S.P., S.S., S.M., OGH, OGH, IPA
 6. Penguji Internal 1: Laksana Tri Gunanto, Ir. Supriyanto, S.T., M.Eng.Sc., M. Sc, S.T., OGH,
 OGH, IPU DMK, OGH
 7. Penguji Internal 1: Dr. Herlina B. Siregar, M. S., OGH, OGH
 8. Penguji Internal 1: Prof. Dr. H. Sidiqul Mujib, S.S., OGH
 9. Penguji Internal 1: Prof. Dr. H. Sidiqul Mujib, S.S., OGH

Boqir, 17 Februari 2022



